LAPORAN PENELITIAN

DAMPAK SOSIAL PROGRAM HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm) DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP DISTRIBUSI PENDAPATAN MASYARAKAT

(Studi Kasus : Desa Gudang Garam, Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai)

UNIVERSITAS MEDAN AREA
UNIVERSITAS MEDAN AREA PERPUSTAKAAN PUSAT

OLEH :

DRS. KHAIRUL SALEH, MMA.
NIP. 131.675.581

Dosen Kopertis Wilayah I Sumatera Utara
dpk. Universitas Medan Area

elitian
07

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2007

UNIVERSITAS MEDAN AREA

LAPORAN PENELITIAN

DAMPAK SOSIAL PROGRAM HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm) DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP DISTRIBUSI PENDAPATAN MASYARAKAT

(Studi Kasus : Desa Gudang Garam, Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai)

OLEH :

DRS. KHAIRUL SALEH, MMA.
NIP. 131.675.581

Dosen Kopertis Wilayah I Sumatera Utara
dpk. Universitas Medan Area

UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 0 7

UNIVERSITAS MEDAN AREA

LAPORAN PENELITIAN

1. Judul Penelitian : Dampak Sosial Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Kontribusinya Terhadap Distribusi Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus : Desa Gudang Garam, Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai)

2. Ketua Peneliti
   - Nama : Drs. Khairul Saleh, MMA.
   - NIP : 131.675.581
   - Jenis Kelamin : Laki-laki
   - Pangkat/Gol. : Lektor / III (c)
   - Univ/Instansi : Fakultas Pertanian Universitas Medan Area

3. Lokasi Penelitian : Desa Gudang Garam, Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai

4. Lama Penelitian : 3 (tiga) bulan.

5. Biaya Penelitian : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Medan, Desember 2007

Mengetahui/Menyetujui :
Dekan,

(Prof. Dr. Ir. A. Rafiqi Tantawi, MS.)

Peneliti

(Drs. Khairul Saleh, MMA.)

Lembaga Penelitian
Ketua,

(Ir. Roeswandy)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmad dan hidayahNya sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik.

Penelitian ini berjudul : Dampak Sosial Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Kontribusinya Terhadap Distribusi Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus : Desa Gudang Garam, Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai), yang dimaksudkan sebagai salah satu perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantan, saran dan kritik yang membangun sehingga penelitian ini berjalan dengan baik. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Desember 2007

Peneliti

UNIVERSITAS MEDAN AREA

DAFTAR ISI

Teks Hal

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vii

DAFTAR LAMPIRAN viii

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Identifikasi Masalah 3

1.3. Tujuan Penelitian 3

1.4. Manfaat Penelitian 3

II. TINJAUAN PUSTAKA dan LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Pengertian 4

2.1.2. Sejarah Hutan Kemasyarakatan 5

2.1.3. Maksud dan Tujuan Hutan Kemasyarakatan 7

2.1.4. Pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan 7

2.1.5. Produk yang Dihasilkan 11

2.1.6. Contoh Keberhasilan Pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan 11

2.2. Landasan teori 12

2.3. Kerangka Pemikiran 16

III. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penentuan Daerah Penelitian 17

3.2. Metode Pengumpulan Data 17

UNIVERSITAS MEDAN AREA

3.3. Metode Pengambilan Sampel 17
3.4. Metode Analisa Data
3.4.1. Analisa Distribusi Pendapatan 18
3.4.2. Analisa Kontribusi Program HKm Terhadap Distribusi Pendapatan Masyarakat 19
3.4.3. Analisa Dampak Sosial Program HKm Terhadap Masyarakat 19
3.5. Definisi dan Batasan Operasional 19

IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN
4.1. Keadaan Umum Wilayah Penduduk
a. Sejarah dan Status Kawasan 22
b. Letak Desa 22
c. Keadaan Biofisik 23
d. Komposisi Penduduk 23
e. Keadaan Fisik 24
4.2. Keadaan Umum Lokasi Hutan Kemasyarakatan
4.2.1. Letak dan Luas 26
4.2.2. Sarana dan Prasarana 26
4.2.3. Proses Penetapan 27
4.2.4. Perkembangan Pengelolaan 27

V. HASIL dan PEMBAHASAN
5.1. Karakteristik Responden
5.1.1. Karakteristik Masyarakat Peserta HKm 30
5.1.2. Karakteristik Masyarakat Bukan Peserta HKm 33
5.2. Distribusi Pendapatan
5.2.1. Distribusi Pendapatan Total 35
5.2.2. Distribusi Pendapatan Luar Program HKm (Pendaptan Masyarakat Tanpa Program HKm) ... 38

UNIVERSITAS MEDAN AREA

5.2.3. Distribusi Pendapatan Masyarakat Dari Program HKm 40
5.2.4. Distribusi Pendapatan Masyarakat "Dengan" dan "Tanpa" Program HKm (dengan Adanya Perubahan Strategi Manajemen Hutan) 42
5.3. Kontribusi Program Hutan Kemasyarakatan Terhadap Distribusi Pendapatan
5.3.1. Rank Correlation Ratio 45
5.3.2. Kontribusi Terhadap Gini Ratio Pendapatan Total 46
5.3.3. Elastisitas Gini Ratio 47
5.4. Dampak Sosial Program Hutan Kemasyarakatan
5.4.1. Persepsi Masyarakat 49
5.4.2. Pola Hubungan dengan Hutan 51
5.4.3. Status Penguasaan Lahan Hutan 52
5.4.4. Pola Usaha Tani/Jenis Tanaman 53
5.4.5. Pola Hubungan Keluarga 54

VI. KESIMPULAN dan SARAN

6.1. Kesimpulan 55
6.2. Saran 56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA

DAFTAR GAMBAR

No	Teks	Hal
1.	Derajat Kemerataan Kurva Lorenz	14
2.	Kurva Lorenz Distribusi Pendapatan Masyarakat.....	18
3.	Kurva Lorenz Distribusi Pendapatan Total Masyarakat Desa Gudang Garam	36
4.	Kurva Lorenz Distribusi Pendapatan Garam Dari Luar Program Hutan Kemasyarakatan	39
5.	Kurva Lorenz Distribusi Pendapatan Masyarakat Dari Program Hutan Kemasyarakatan	41
6.	Kurva Lorenz Distribusi Pendapatan Masyarakat "Dengan" dan "Tanpa" Program Hutan Kemasyarakatan	43

UNIVERSITAS MEDAN AREA

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hutan adalah salah satu sumber kekayaan alam kita yang mempunyai makna dan kepentingan tinggi bagi seluruh lapisan rakyat Indonesia. Menurut UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan juga merupakan ekositem yang berperan penting dalam menunjang kehidupan manusia.

Indonesia memiliki hutan hujan tropika terluas ketiga setelah Brazil dan Zaire. Sepuluh persen (10%) hutan hujan tropika dunia berada di sepanjang khatulistiwa di Indonesia. Hutan tipe ini sangat kaya sumber - sumber biologi (10% spesies tanaman berbunga, 12% mamalia, 16% spesies reptil dan 17% spesies burung) dan kebudayaan masyarakat lokal (Soemarwoto, 1992). Hutan Indonesia adalah milik seluruh bangsa Indonesia dan pengelolaannya dikuasai oleh negara. Karena itu pembangunan kehutanan sebagai salah satu bagian dari pembangunan nasional diarahkan untuk menjamin kelangsungan penyediaan dan perluasan hasil hutan bagi pembangunan industri, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, sumber pendapatan negara dan dapat memacu kesempatan pembangunan di daerah, serta menjaga fungsi hutan sebagai salah satu penentu ekosistem (Wardoyo, 1997).

Pengusahaan hutan yang sudah dimulai sejak jaman kolonial dilanjutkan dengan pengusahaan hutan oleh swasta melalui pola Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Kebijakan tata cara penebangan hutan yang dimulai tahun 1972 melalui TPI (Tebang Pilih Indonesia) terus mengeksploitasi hutan sehingga menyebabkan kerusakan hutan. Dengan kata lain krisis kehutanan yang terjadi berakar dari paradigma kehutanan yang berbasis negara (*State - Based Forest Management*) (Soemarwoto, 2000).

Untuk mengantisipasi hal tersebut, dalam perjalanan pengelolaan hutannya, Indonesia mengalami pergeseran paradigma kehutanan menjadi kepada pengelolaan

yang lebih bernuansa sosial (kemasyarakatan) atau sering disebut *Community Based Forest Management* (Awang dkk, 2000).

Paradigma baru pembangunan kehutanan pada hakikatnya adalah untuk sebesar - besarnya kemakmuran rakyat secara berkeadilan dan berkelanjutan. Masyarakat setempat diarahkan sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan. Masyarakat di sekitar hutan diarahkan sebagai pemegang hak untuk dapat menentukan sendiri disesuaikan dengan potensi, pengetahuan dan kebutuhan dalam menumbuhkan kemandirian usahanya (MKI, 1998).

Dengan adanya konsep pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar dan di dalam kawasan hutan untuk mengusahakan akses terhadap sumber daya hutan, sehingga dengan adanya pola hutan kemasyarakatan merupakan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat (Dephutbun, 1999). Aktivitas – aktivitas dalam pengembangan hutan kemasyarakatan diduga telah menimbulkan dampak – dampak terutama pada perubahan komponen lingkungan sosial baik itu sosial ekonomi maupun sosial budaya bagi penduduk yang terlibat langsung dalam kegiatan – kegiatan hutan kemasyarakatan dan masyarakat yang tidak terlibat.

Propinsi Sumatera Utara sebagai salah satu propinsi di Indonesia pada Pelita VI mempuyai target kegiatan hutan kemasyarakatan seluas 7500Ha. Pada tahun anggaran 1996/1997 kegiatannya telah dilaksanakan di Desa SiUjan – Ujan dan Desa Tolong Buho, Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 500Ha. Sebagai tindak lanjut untuk memenuhi target tersebut pada tahun anggaran 1998/1999 kegiatan hutan kemasyarakatan dilaksanakan di Desa Gudang Garam, Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai dengan luas areal 200Ha (Wardoyo,1997).

Untuk melihat sejauh mana program hutan kemasyarakatan memberikan peluang bagi peningkatan kesejahteraan dan perubahan sosial masyarakat maka penulis mencoba membahas melalui penelitian yang dilakukan dengan judul "Dampak Sosial Program Hutan Kemasyarakatan dan Kontribusinya Terhadap Distribusi Pendapatan Masyarakat".

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1.2. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian maka dapat didentifikasikan masalah – masalah yang akan diteliti di lapangan yaitu :

a. Bagaimana dampak sosial program hutan kemasyarakatan terhadap masyarakat desa.
b. Berapa besar kontribusi yang diberikan program hutan kemasyarakatan terhadap distribusi pendapatan masyarakat.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui dampak – dampak sosial program hutan kemasyarakatan terhadap masyarakat.
b. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi program hutan kemasyarakatan terhadap distribusi pendapatan masyarakat.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam pengembangan kegiatan hutan kemasyarakatan dimasa yang akan datang.
b. Sebagai bahan masukan bagi pembuat kebijakan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan hutan kemasyarakatan di Desa Gudang Garam dan desa lainnya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

1.1. Tinjauan Pustaka

Sumberdaya hutan merupakan salah satu unsur dasar pembangunan yang pemanfaatannya perlu dilakukan secara bijaksana, sehingga sumberdaya hutan tersebut tetap lestari keberadaannya. Dalam konsep pembangunan kehutanan, kesejahteraan masyarakat merupakan prioritas utama, sehingga dalam pemanfaatan hutan untuk kesejahteraan tersebut diharapkan tetap memperhatikan kaidah – kaidah konservasi tanah demi kelestarian fungsi dari hutan. Selain itu dilihat dari sisi fungsi produksinya, keberpihakan kepada rakyat banyak merupakan kunci keberhasilan pengelolaan hutan (Dephutbun, 1999).

2.1.1. Pengertian

Hutan kemasyarakatan atau yang juga dikenal dengan *community forestry* memiliki beberapa pengertian yaitu :

a. Hutan Kemasyarakatan menurut Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 31 Tahun 2000 adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya.
b. Hutan Kemasyarakatan menurut definisi Gilmour dan Fisher disitasi Soemarwoto (2000) adalah pengendalian dan pegelolaan sumberdaya hutan oleh masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sebagai bagian terpadu dari sistem pertanian setempat.

Dalam pelaksanaan program hutan kemasyarakatan terdapat beberapa istilah yang perlu dipahami, diantaranya :

a. Perhutanan sosial (Wardoyo, 1997) diartikan sebagai pelibatan masyarakat dalam bentuk pemberian ijin pengusahaan hutan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai wujud partisipasi masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan dalam pembangunan kehutanan untuk merencanakan, mengusahakan, memelihara, mengendalikan dan mengawasi serta memanfaatkan hasil hutan (baik

kayu maupun non kayu) dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumberdaya.

b. Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKm) adalah hak yang diberikan oleh Menteri Kehutanan kepada masyarakat setempat melalui koperasinya untuk melakukan hutan kemasyarakatan dalam jangka waktu tertentu.
c. Peserta hutan kemasyarakatan adalah orang yang kehidupannya dari hutan atau kawasan hutan yang secara sukarela berperan aktif dalam hutan kemasyarakatan.
d. Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga negara Indonesia yang tinggal di dalam dan atau sekitar hutan yang membentuk komunitas yang didasarkan pada kesamaan mata pencaharian yang berkaitan dengan hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal, serta peraturan tata tertib kehidupan bersama.

UNIVERSITAS MEDAN AREA PERPUSTAKAAN PUSAT

2.1.2. Sejarah Hutan Kemasyarakatan

Kerusakan hutan hujan tropis Indonesia tidak terlepas dari kebijakan kehutanan Indonesia yang menjadikan hutan sebagai objek paling dragmatis memberikan keuntungan dalam jangka waktu yang pendek. Hutan dijadikan komoditi yang paling mudah mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi dijadikan alasan guna melakukan eksploitasi hutan tanpa memperhitungkan daya dukung, keberlanjutan dan kelestarian hutan (Halawa, 2000).

Pengusahaan hutan secara besar – besaran dengan pola HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dimulai sejak dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan dan PP No. 21 Tahun 1970 tentang HPH dan HPHH (Hak Pemungutan Hasil Hutan). Hal ini semakin memperburuk keadaan hutan Indonesia (Koesmono, 1999). Persoalan penting lainnya yang dihadapi oleh kehutanan Indonesia adalah konflik dengan masyarakat setempat pada semua fungsi hutan. Konflik terjadi karena adanya penggusuran secara besar – besaran terhadap hak kepemilikan atau karena adanya masyarakat setempat yang tidak memiliki akses terhadap lahan pertanian (Suto Raja, 2003).

Seiring dengan berhembusnya reformasi terjadi perubahan/pergeseran orientasi pengelolaan hutan yang lebih meningkatkan peran serta masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan. Dalam kaitannya dengan hal ini, Dephutbun mulai memberikan perhatian yang semakin besar kepada program – program hutan kemasyarakatan.

Ide pembangunan kehutanan dengan pola hutan kemasyarakatan sebenarnya mulai dirintis sejak tahun 1995, dengan ditetapkannya SK Menhut No. 622/Kpts-II/1995 tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan. Namun pelaksanaannya sendiri kurang berjalan dengan baik karena masih kurang tersosialisasinya program tersebut di masyarakat dan belum adanya petunjuk teknis dan pelaksanaannya. Untuk mengatasinya ditetapkan SK Menhutbun No. 677/Kpts-II/1998 tentang Hutan Kemasyarakatan. Dengan ditetapkannya UU No. 41 Tahun 1999, ditetapkan pula surat keputusan yang baru yang sesuai dengan undang – undang tersebut yaitu SK Menhut No. 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan (Priyo, 1999).

Di Sumatera Utara, program hutan kemasyarakatan mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 1996/1997 di Desa SiUjan – Ujan dan Tolong Buho (Wardoyo, 1997). Berdasarkan hal ini Desa Gudang Garam kemudian mengajukan usul ke BRLKT pada tahun 1998 untuk menjadikan desa ini juga termasuk ke dalam program hutan kemasyarakatan.

Berdasarkan usulan tersebut kemudian pihak BRLKT melakukan peninjauan, pemplotan dan pengukuran lahan. Setelah dianggap layak, maka dilaksanakan program hutan kemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Koesmono (1999) bahwa yang mendorong perlu dan tidaknya membangun hutan kemasyarakatan pada kawasan hutan tertentu adalah adanya hutan yang memenuhi syarat – syarat untuk dibentuk menjadi unit hutan kemasyarakatan dan adanya kelompok masyarakat yang berminat. Sebelum ada kegiatan program hutan kemasyarakatan lahan tersebut adalah bekas ladang berpindah, dan sudah ada sebagian masyarakat dari luar desa yang menggarap. Masyarakat tersebut dirangkul dan diikutsertakan dalam program hutan kemasyarakatan dengan persyaratan mau mengikuti semua peraturan pada program

UNIVERSITAS MEDAN AREA

hutan kemasyarakatan dan tidak boleh menanam sawit. Karena itu ada masyarakat yang berasal dari luar Desa Gudang Garam yang ikut dalam program ini.

2.1.3. Maksud dan Tujuan Hutan Kemasyarakatan

Maksud dari pelaksanaan hutan kemasyarakatan adalah pemberdayaan masyarakat dan pemberian kepercayaan kepada masyarakat setempat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan, untuk mengusahakan hutan negara sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan pengetahuan sehingga kelestarian sumberdaya hutan dapat dipertahankan (Dephutbun, 1999).

Pembangunan hutan kemasyarakatan bertujuan :

a. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan dan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat.
b. Meningkatkan ikatan komunitas masyarakat pengusahaan hutan.
c. Mengembangkan keanekaragaman hasil hutan yang menjamin kelestarian fungsi dan manfaat hutan.
d. Meningkatkan mutu, produktivitas dan keamanan hutan.
e. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkah pendapatan negara dan masyarakat.
f. Mendorong serta mempercepat pembangunan wilayah (Dephutbun, 1999).

2.1.4. Pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan

Model hutan kemasyarakatan sebenarnya hanya sesuai untuk diterapkan dalam pengelolaan dan sekaligus pelestarian areal - areal hutan yang berukuran kecil dan kebanyakan berada pada lokasi – lokasi terpencil, baik di dalam maupun di luar kawasan yang ditetapkan pemerintah sebagai hutan negara. Luas kawasan hutan yang cocok untuk model hutan kemasyarakatan adalah antara 40 - 10.000 Ha. Kawasan hutan yang dijadikan areal hutan kemasyarakatan adalah kawasan hutan produksi, hutan lindung dan kawasan pelestarian alam pada zonasi pemanfaatan taman hutan raya dan wisata (Dephutbun, 1999).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Pelaksanaan hutan kemasyarakatan memiliki prinsip – prinsip dasar sebagai berikut :

a. Masyarakat sebagai pelaku utama

Sejalan dengan pembangunan kehutanan yang ingin memberdayakan masyarakat, maka dalam hutan kemasyarakatan yang menjadi pelaku utama pelaksanaannya adalah masyarakat. Kegiatan hutan kemasyarakatan pada dasarnya dilaksanakan oleh masyarakat atau anggota masyarakat yang berada di dalam dan atau di sekitar kawasan hutan yang kawasannya ditetapkan sebagai areal kegiatan hutan kemasyarakatan (Wardoyo,1997).

Pelaksanaan hutan kemasyarakatan diprioritaskan pada masyarakat setempat yang kehidupannya tergantung pada sumberdaya hutan. Hutan dan masyarakat di sekitarnya merupakan satu kesatuan ekosistem yang satu sama lain saling ketergantungan. Hutan bagi masyarakat tradisional dianggap sebagai sumber penghasil makanan/kebutuhan, seperti buah - buahan, berburu binatang, bahan bakar dan lain – lain. Sebaliknya masyarakat modern lebih memandang hutan sebagai sumber bahan mentah bagi proses manufaktur untuk mendapatkan nilai tambah lebih lanjut. Atas dasar ini semua diaktualisasikan dalam bentuk pemberian hak pengusahaan kepada masyarakat lokal untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam seluruh tahapan pengelolaan hutan yaitu dari perencanan dan pemasaran (Amin dkk, 2002).

b. Memiliki kepastian hak dan kewajiban semua pihak.

Hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan hutan kemasyarakatan baik itu masyarakat dan pemerintah diatur cukup jelas. Masyarakat sebagai peserta hutan kemasyarakatan berhak atas hasil hutan non kayu dan melakukan kegiatan pemeliharaan hutan kemasyarakatan sesuai dengan lokalisasi yang telah ditetapkan. Di dalam pelaksanaannya setiap peserta kegiatan hutan kemasyarakatan mendapat ijin mengelola areal hutan kemasyarakatan seluas maksimum 4 Ha untuk peserta perorangan, untuk peserta kelompok seluas maksimum 4 Ha jumlah anggota kelompok yang turut serta sebagai peserta, untuk koperasi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

seluas maksimum 4 Ha dikalikan jumlah anggota koperasi yang turut serta sebagai peserta hutan kemasyarakatan (Wardoyo, 1997).

Selain hak tersebut peserta hutan kemasyarakatan juga memiliki kewajiban yakni terlibat langsung dalam proses penyusunan rencana dan pelaksanaan program hutan kemasyarakatan serta hal – hal yang terkait di dalamnya. Selain kewajiban tersebut di atas masyarakat sebagai peserta hutan kemasyarakatan juga memiliki kewajiban untuk tetap menjaga kelestarian fungsi dan manfaat hutan. Sedangkan pemerintah sebagai fasilisator dan pemantau program menjalankan fungsi kontrolnya mengawasi pelaksanaan hutan kemasyarakatan secara seksama agar diperoleh hasil yang maksimum (Priyo, 1999).

c. Keragaman komoditas (kayu dan non kayu), keadilan dan kelestarian, sederhana dan dinamis

Komoditas tanaman yang digunakan dalam hutan kemasyarakatan harus dipilih sesuai dengan karakteristik daerah dan lahan yang akan ditanami. Sebelum melakukan pemilihan komoditas harus dilakukan inventarisasi dan identifikasi tanaman yang ada di daerah tersebut. Pemilihan jenis komoditi termasuk hal yang sangat penting. Secara teknis pemilihan jenis komoditi ini mempertimbangkan faktor fisik teknis/ekologi, faktor sosial ekonomi dan sosial budaya.

Faktor fisik teknis/ekologi yang harus diperhatikan antara lain adalah tinggi tempat, kemiringan (topografi), kesuburan tanah, iklim (curah hujan, suhu), kondisi vegetasi awal. Faktor – faktor yang harus diperhatikan dari segi sosial ekonomi adalah komoditas harus mempunyai nilai ekonomis tinggi, disukai masyarakat setempat, mempunyai prospek pasar yang baik dan mempunyai fungsi *Multiple Purpose Tree Species* (MPTS). Selain faktor tersebut juga harus diperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, antara lain adat istiadat, keberadaan pemimpin masyarakat baik formal maupun non formal serta kelembagaan adat (Wardoyo, 1997).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Tahap – tahap pelaksanaan hutan kemasyarakatan :

a. Pencadangan areal hutan kemasyarakatan, dapat dicadangkan pada kawasan hutan produksi, kawasan lindung dan pada kawasan pelestarian alam pada zona pemanfaatan.
b. Penyiapan kondisi masyarakat, merupakan kegiatan awal yang penting dilaksanakan sebelum pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan.
c. Terbentuknya kelembagaan masyarakat berdasarkan aspirasi dan inisiatif masyarakat itu sendiri dalam mengelola hutan secara lestari. Penyiapan kondisi masyarakat dilakukan melalui penyebarluasan informasi tentang kebijakan dan peraturan hutan kemasyarakatan.
d. Perencanaan, rencana pengembangan hutan kemasyarakatan diawali dengan diperolehnya hak pengusahaan hutan kemasyarakatan, koperasi masyarakat lokal wajib menyusun Rencana Induk Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (RPHKm), Rencana Karya Lima Tahunan Hutan Kemasyarakatan (RKLHKm).
e. Pelaksanaan, hutan kemasyarakatan dikelola oleh koperasi masyarakat lokal sebagai pemegang hak pengusahaan hutan kemasyarakatan.
f. Pemantauan dan evaluasi di lapangan, sebagai pemegang hak pengusahaan hutan kemasyarakatan, koperasi memantau sendiri kegiatan pengelolaan hutan kemasyarakatan (Dephutbun, 1999).

Berdasarkan bentuk kegiatannya hutan kemasyarakatan dapat dibedakan menjadi :

a. Aneka Usaha Kehutanan

Suatu bentuk kegiatan hutan kemasyarakatan dengan memanfaatkan ruang tumbuh atau bagian dari tumbuh – tumbuhan hutan. Kegiatan – kegiatan yang termasuk di dalamnya antara lain budidaya rotan, pemungutan getah-getahan, minyak - minyakan, obat - obatan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

b. *Agroforestry*

Agroforestry adalah suatu bentuk kegiatan hutan kemasyarakatan yang memanfaatkan lahan secara optimal dalam suatu hamparan yang menggunakan produksi berdaur panjang dan berdaur pendek, baik secara bersamaan maupun berurutan. *Agroforestry* dapat dilaksanakan dalam beberapa model, antara lain adalah tumpang sari (cara bercocok tanam antara tanaman pokok dan tanaman semusim), *Silvopasture* (campuran kegiatan kehutanan, penanaman rumput dan peternakan), *Silvofishery* (campuran kegiatan pertanian dengan usaha perikanan di daerah pantai) dan *Farmforestry* (campuran kegiatan pertanian dengan kehutanan) (Wardoyo, 1997).

2.1.5. Produk yang Dihasilkan

Produk yang dihasilkan dari kegiatan hutan kemasyarakatan adalah merupakan hasil hutan non kayu berupa buah – buahan (durian, duku, nangka, petai, rambutan), getah – getahan (damar, terpentin), minyak, biji – bijian, jamur, rotan dan bambu (Wardoyo, 1997). Program hutan kemasyarakatan di Desa Gudang Garam memanfaatkan jenis tanaman seperti jati putih, mahoni, kapas, melinjo, cokelat, pisang barangan, ubi kayu dan kencur. Tanaman yang dominan ditanam adalah karet

2.1.6. Contoh Keberhasilan Pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan

Contoh keberhasilan pelaksanaan hutan kemasyarakatan adalah yang terdapat di Kabupaten Wonosobo. Di daerah tersebut masyarakat mampu melakukan pembangunan kehutanan yang lestari dan berkesinambungan dan telah memiliki pengalaman yang signifikan (Krustanto, 2003).

2.2. Landasan Teori

Undang - Undang Dasar 1945 merupakan landasan ideologis bagi pengelolaan hutan dan sumberdaya alam lainnya, seperti yang tercantum dalam pasal 33 ayat 2 dan 3.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Ayat 2 menyebutkan bahwa :

"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara".

Sedangkan ayat 3 menyebutkan bahwa :

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" (Soemarwoto, 1992).

Hal tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa pemanfaatan kekayaan alam dalam hal ini pemanfaatan sumberdaya hutan harus dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat yang pelaksanaannya diimplementasikan melalui program hutan kemasyarakatan.

Pemerataan hasil pembangunan meliputi pemerataan atau peluang yang sama penduduk untuk memperoleh dan menikmati hasil pembangunan di semua sektor pembangunan, antara lain bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial lainnya, serta kesamaan untuk memperoleh akses sosial dan ekonomi, sehingga pada akhirnya akan terwujud pemerataan kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah dan pelosok tanah air. Salah satu indikasi untuk melihat sejauh mana program pemerataan pembangunan tersebut telah dicapai, adalah dengan melihat kesenjangan distribusi pendapatan penduduk. Kesenjangan distribusi pendapatan penduduk di suatu daerah antara lain disebabkan oleh faktor – faktor kepemilikan sumberdaya (manusia) seperti jumlah penduduk dan kualitas tenaga kerja, kepemilikan faktor – faktor produksi seperti modal, lahan, teknologi dan sarana/bangunan pendukung kegiatan ekonomi dan faktor – faktor produksi lainnya, ketidaksempurnaan pasar, seperti monopoli pasar dan tingkat harga yang tidak stabil. Distribusi pendapatan disektor perekonomian adalah hasil akhir kerja seluruh proses ekonomi yang berarti bahwa teori distribusi pendapatan pada prinsipnya harus mempertimbangkan semua pengaruh (BPS, 2000).

Pengukuran distribusi pendapatan dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain : ukuran Thell, Oshima, Kuznets, Kriteria Bank Dunia dan Koefisien Gini (Todaro, 1985). Kriteria Bank Dunia telah umum dipakai dan diterapkan di

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Indonesia. Menurut kriteria ini, ketimpangan distribusi pendapatan ditentukan sebagai berikut :

1. Jika 40% jumlah peduduk dengan pendapatan terendah menerima lebih kecil 12% jumlah pendapatan suatu wilayah atau negara, maka distribusi pendapatan di daerah tersebut mempunyai ketimpangan yang tinggi.
2. Jika 40% jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerima antara 12 - 17% jumlah pendapatan suatu wilayah, maka distribusi pendapatan tersebut merupakan ketimpangan sedang.
3. Jika 40% jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerima lebih besar dari 17% pendapatan suatu daerah maka distribusi pendapatan di daerah tersebut merupakan ketimpangan rendah.

Dalam kajian ini digunakan indeks gini. Indeks gini ini digunakan dalam analisis kurva lorenz. Kurva lorenz adalah kurva yang menunjukkan hubungan kuantitatif antara persentase penduduk dan persentase pendapatan yang diterima. Semakin jauh kurva lorenz tersebut dari garis diagonal semakin tinggi tingkat ketimpangan yang ditunjukkan. Perumusan indeks gini sebagai berikut .

$$G = 1 - 1/10.0000 \sum_{i=1}^{k} Pi\,(Qi + Qi - 1) \qquad (2.1)$$

Nilai indeks gini berkisar antara 0 dan 1. Jika indeks gini mempunyai nilai satu, berarti distribusi pendapatan mempunyai ketimpangan mutlak (sangat timpang). Indeks ini mempunyai beberapa kelebihan, misalnya saja tentang perhitungan yang relatif mudah dan tidak terikat pada distibusi pendapatan yang sedang diamati. Namun demikian indeks gini ini tidak peka terhadap perubahan – perubahan kecil pendapatan yang diamati karena tekanannya pada penyebarannya.

Selain itu, indeks gini sangat dipengaruhi oieh nilai rata – rata yang diperoleh untuk kelompok pendapatan tertinggi. Salah satu cara pengukuran distribusi pendapatan dengan indeks gini digunakan dalam analisis kurva lorenz (Gambar 1). Kurva ini menggambarkan persentase kuantitatif rumah tangga dikaitkan dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

persentase kuantitatif pendapatan. Semakin jauh kurva tersebut dari garis diagonal semakin tinggi ketimpangan yang ditunjukkan.

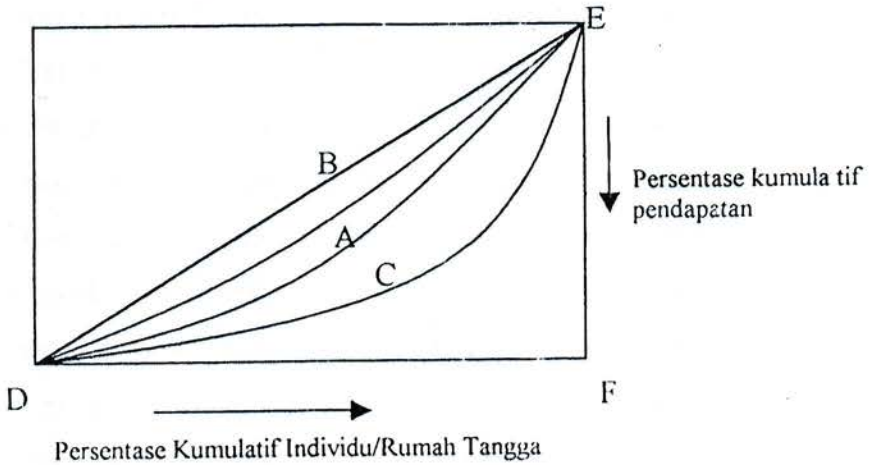

Gambar 1. Derajat Kemerataan Kurva Lorenz

Untuk mempelajari dampak perubahan teknologi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan keluarga tani diadakan analisis dekomposisi gini ratio yang telah dilakukan Jatileksono (1992), yang secara kuantitatif memberikan ukuran penting bagi komponen pendapatan terhadap pendapatan keluarga petani yang dianalisis. Formula untuk mencari dekomposisi gini ratio adalah :

$$G(y) = \sum I \,.\, R(y,xi) \,.\, G(xi) \qquad (2.2)$$

Disini G (y) = gini ratio pendapatan total, I = pangsa komponen pendapatan ke-i, R (y,xi) = *rank correlation ratio* dan G (xi) = gini ratio komponen pendapatan ke-i. *Rank correlation ratio* didefinisikan sebagai :

$$R(y,xi) = Cor\{xi, r(y)\} / cor\{xi, r(xi)\} \qquad (2.3)$$

Disini r(y) dan r(xi) adalah ranking keluarga tani menurut tingkat pendapatan y dan xi. R(y,xi) =1 jika r(y) = r(x) dan selain itu R akan kurang dari satu. Semakin tinggi korelasi antara y dan xi pada umumnya R semakin besar. Sifat – sifat korelasi gini menyerupai korelasi Pearson dan Ranking. Korelasi gini sama dengan +1 (-1) ketika sumbangan pendapatan mengalami kenaikan (penurunan) tinggi total pendapatan. Ketika pendapatan konstan, maka korelasi gininya sama dengan nol. Dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

menggunakan formula tersebut, dapat diukur besarnya kontribusi masing – masing komponen pendapatan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan total.

Analisa proyek mencoba untuk menentukan dan menilai biaya – biaya dan manfaat – manfaat yang akan timbul dengan usulan proyek dan membandingkan kedua – duanya dengan situasi tanpa proyek. Perbedaannya adalah tambahan manfaat netto akan muncul dari investasi proyek. Pendekatan ini tidak sama dengan perbandingan dalam "sebelum" dan "sesudah" proyek. Perbandingan sebelum dan sesudah proyek tidak memperhitungkan perubahan – perubahan produksi tanpa pelaksanaan proyek sehingga mengarah pada laporan yang salah mengenai pengertian manfaat investasi proyek.

Suatu perubahan output apabila tanpa proyek dapat ditempatkan dalam dua macam situasi. Yang paling umum adalah apabila produksi dalam suatu lingkungan sudah berkembang, bila berkembang secara lambat, dan barangkali terus bertambah selama proyek berlangsung. Tujuan dari proyek tersebut adalah meningkatkan pertumbuhan melalui intensifikasi produksi. Suatu perubahan output juga dapat terjadi walaupun tanpa proyek yaitu produksi akan jatuh apabila tidak ada investasi baru. Dalam beberapa hal, suatu investasi yang dimaksudkan untuk menghindari kerugian mungkin juga dapat mendorong peningkatan produksi, sehingga jumlah manfaat yang timbul adalah sebagian dari kerugian yang dihindari dan sebagian dari peningkatan produksi. Perbandingan sebelum dan sesudah proyek secara sederhana akan gagal menentukan manfaat yang nyata, hal ini disebabkan karena menghindari kerugian. Jika tidak ada perubahan output yang diharapkan dari proyek berarti sama saja dengan tanpa proyek, maka perbedaan antara perbandingan sebelum dan sesudah, dengan dan tanpa perbandingan menjadi kurang penting (Gittinger, 1986).

Sasaran yang ingin dicapai dari program hutan kemasyarakatan itu sendiri meliputi sasaran ekologi, ekonomi dan sosial. Suatu perubahan sosial bisa secara sengaja dilaksanakan maupun secara tidak disadari akan terjadi. Perubahan sosial dapat meliputi bidang materil dan perubahan non – materil, dimana sifat serta akibat dari adanya perubahan tersebut bisa positif dan bisa pula negatif. Pada masyarakat desa proses perubahan sosial biasanya berlaku lambat dan karena menghabiskan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

waktu lama maka terjadinya perubahan sosial tidak dirasakan dan tidak menyolok. Keragaman perubahan sosial pada masyarakat desa :

a. Perubahan sosial yang lambat tetapi terus mengarah ke arah kemajuan.
b. Perubahan sosial ke arah kemajuan tetapi pada suatu saat terjadi kemunduran yang tidak diduga sebelumnya.
c. Perubahan sosial yang labil, kadang-kadang terdapat kemajuan, tetapi kadang terdapat kemunduran (Bherata, 1982).

2.3. Kerangka Pemikiran

Secara skematis kerangka pemikiran tentang hubungan Dampak Sosial Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Kontribusinya terhadap Distribusi Pendapatan Masyarakat dapat digambarkan ke dalam diagram pola aliran yaitu diagram aliran dampak sebagai berikut :

SKEMA KERANGKA PEMIKIRAN

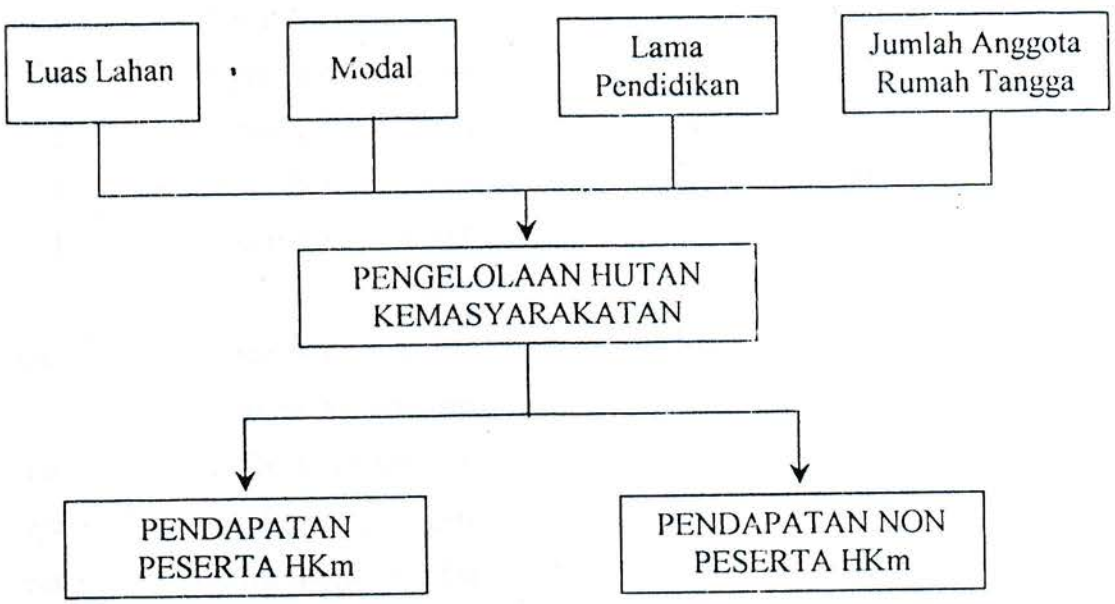

UNIVERSITAS MEDAN AREA

III. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penentuan Daerah Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gudang Garam, Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara, pada bulan Oktober – November 2007. Lokasi ini ditentukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa daerah ini merupakan wilayah pelaksanaan hutan kemasyarakatan di Sumatera Utara yang kegiatannya masih berjalan.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumbernya, data yang dikumpulkan ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer, diperoleh melalui wawancara, observasi partisipatoris dan quisioner. Observasi partisipatoris dalam arti penulis ikut tinggal di tengah – tengah masyarakat selama beberapa waktu. Quisioner dibagikan kepada masyarakat/sampel dan sekaligus dilakukan wawancara. Selama penelitian, wawancara kebanyakan dilakukan pada sore hari, karena dari pagi hingga sore hari masyarakat berada di ladang dan pada malam hari ke mesjid karena penelitian ini dilakukan pada saat bulan puasa.
b. Data sekunder, diperoleh dari data desa, data kepustakaan dan dari dinas kehutanan serta instansi terkait lainnya.

3.3. Metode Pengambilan Sampel

Penelitian ini merupakan studi kasus, yang menjadi populasi adalah seluruh masyarakat Desa Gudang Garam (165 kepala keluarga). Ada dua kategori responden dalam penelitian ini, yaitu petani peserta hutan kemasyarakatan dan anggota masyarakat yang bukan peserta hutan kemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode sensus, jadi seluruh populasi yang ada dijadikan sampel.

3.4. Metode Analisa Data

3.4.1. Analisa Distribusi Pendapatan

Cara yang digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan masyarakat adalah dengan menggunakan koefisien gini. Koefisien Gini merupakan keseluruhan bobot atau ukuran ketidakmerataan pendapatan dan dapat bervariasi dari 0 (nol)/kemerataan sempurna sampai dengan 1 (satu)/ketidakmerataan sempurna (Todaro,1995).

Koefisien Gini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$G = 1 - 1/10.000 \sum_{i=1}^{k} Pi\ (Qi + Qi\text{-}1)$$

dimana :

1. G = Nilai indeks Gini
2. Pi = % Penduduk pada kelas pendapatan ke-i (% jumlah pendapatan pada kelas tersebut)
3. Qi = % Kumulatif pendapatan penduduk sampai kelas ke-i
4. Qi-1 = % Kumulatif pendapatan sampai kelas ke-i-1
5. k = banyaknya kelas

Untuk melihat lebih jelas gambaran distribusi pendapatan masyarakat dapat dibuat ke dalam bentuk kurva yaitu kurva antara persen pendapatan masyarakat dengan persen masyarakat penerima pendapatan tersebut yang dikenal dengan kurva lorenz (Irawan, 1987).

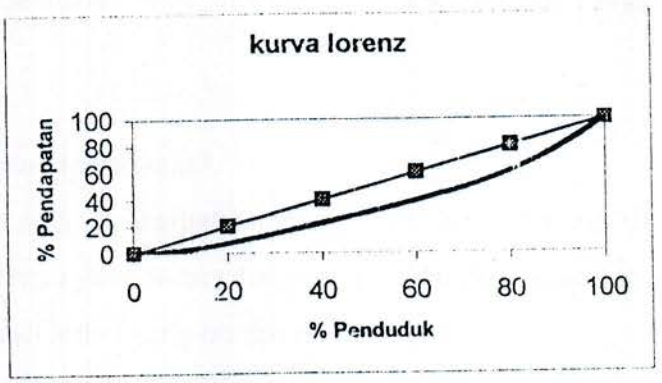

Gambar 2. Kurva Lorenz Distribusi Pendapatan Masyarakat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

3.4.2. Analisa Kontribusi Program HKm Terhadap Distribusi Pendapatan Masyarakat

Untuk menganalisa kontribusi perubahan sektor manajemen pengelolaan hutan dalam hal ini menjadi program hutan kemasyarakatan terhadap distribusi pendapatan masyarakat dilakukan analisis dekomposisi *gini ratio* sesuai dengan Jatileksono (1992) :

$$G(y) = \sum I \,.\, R(y,xi) \,.\, G(xi)$$

$$R(y,xi) = Cor\ \{ yi, r(yi) \} / cor\ \{xi, r(xi)\}$$

$$E(y) = \sum I.\ R(y,xi).\ G(x)/G(y)-I$$

dimana :

G(y) = Gini Ratio Pendapatan Total

xi = Komponen Pendapatan ke-i

I = Pangsa Komponen Pendapatan ke-i

G(xi) = Gini Ratio Pendapatan ke-i

R(y,x) = Rank Corelation Ratio

E(y) = Elastisitas Gini Ratio

3.4.3. Analisa Dampak Sosial Program HKm Terhadap Masyarakat

Untuk menganalisa dampak sosial program hutan kemasyarakatan terhadap masyarakat dilakukan secara deskriptif dengan unit analisis yang didasarkan pada data primer dan data sekunder yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan quisioner.

3.5. Definisi dan Batasan Operasional.

1. Masyarakat adalah seluruh warga/penduduk, baik yang tinggal di dalam dan disekitar kawasan hutan yang secara fungsional melakukan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan yang berupa non kayu.
2. Peserta Hutan Kemasyarakatan adalah masyarakat yang berada di sekitar areal hutan kemasyarakatan yang turut serta dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

3. Status sosial ekonomi adalah keadaan sosial ekonomi masyarakat peserta hutan kemasyarakatan yang dinilai dari beberapa faktor meliputi : luas lahan yang dikuasai, tingkat pendidikan, jumlah dan hubungan anggota rumah tangga.
4. Luas Lahan adalah total luas tanah yang diusahakan peserta hutan kemasyarakatan meliputi tanah sawah, tanah ladang, tanah pekrangan dann areal hutan kemasyarakatan (satuan dalam Ha).
5. Jumlah anggota rumah tangga (RT) adalah banyaknya anggota rumah tangga peserta hutan kemasyarakatan yang tinggal bersama-sama dan turut membantu dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (satuan OrangJiwa).
6. Lama Pendidikan adalah lamanya peserta hutan kemasyarakatan mengecap pendidikan formal sampai masa penelitian (satuan Tahun).
7. Pendapatan peserta hutan kemasyarakatan dari usahanya/hutan kemasyarakatan dari kegiatan usaha taninya/hutan kemasyarakatan dikurangi semua onggos yang dikeluarkan (diukur dalam Rupiah/Tahun).
8. Pelestarian hutan adalah suatu sistim pengelolaan hutan produksi lestari secara berkesinambungan dengan memperhatikan aspek-aspek dan indikator kelestarian hutan yang ditetapkan oleh departemen Kehutanan.
9. Wilayah Kawasan Hutan Silinda di Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai yang dijadikan tempat penelitian dikarenakan pada wilayah terdapat kegiatan Hutan kemasyarakatan sampai saat penelitian.
10. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistim berupa hamparan lahan sumber daya alam hayati dan didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
11. Hutan kemasyarakatan adalah sisitem pengelolaan hutan oleh masyarakat desa hutan dalam rangka peningkatan mutu dan kelestarian hutan serta perbaikan kesejahteraan masyarakat desa hutan.
12. Agroforestry adalah suatu bentuk hutan kemasyarakatan yang memanfaatkan lahan secara optimal dalam suatu hamparan, yang menggunakan produksi berdaur panjang dan berdaur pendek, baik secara bersamaan maupun berurutan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

13. Kontribusi pendapatan hutan kemasyarakatan terhadap peserta hutan kemasyarakatan adalah sumbangan pendapatan dari hutan kemasyarakatan terhadap pendapatan total peserta hutan kemasyarakatan.
14. Silvikultur adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan hutan mulai dari pembibitan, penanaman, pemeliharaan, penebangan dan pengolahan hasil hutan.
15. Sistem silvikultur adalah suatu proses yang mencakup pemeliharaan, penebangan, penggantian tegakan hutan untuk menghasilkan produksi hasil hutan.
16. Hasil hutan adalah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan.
17. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
18. Pola tumpang sari adalah suatu sistem pengelolaan hutan yang memanfaatkan ruang kosong diantara tanaman hutan kemasyarakatan dengan menanami tanaman semusim.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Keadaan Umum Wilayah Penduduk

b. Sejarah dan Status Kawasan

Pada jaman penjajahan Belanda, kawasan Desa Gudang Garam termasuk ke dalam areal kebun tembakau yang ada di Sumatera Utara yang dikelola oleh kolonial Belanda. Pada saat itu, Belanda menggunakan pekerja perkebunan yang diambil dari Pulau Jawa. Setelah Indonesia merdeka kawasan perkebunan dibiarkan tidak terurus hingga menjadi hutan. Pada tahun 1960 – an perusahaan perkebunan dibuka kembali, dan batas – batas perkebunan diperjelas. Dalam perkembangannya terbentuk desa - desa yang ada pada areal perkebunan. Pada saat menjadi areal kebun tembakau ada desa yang menjadi tempat penyimpanan garam yang digunakan sebagai pupuk tanaman tembakau. Garam tersebut juga digunakan untuk kebutuhan dapur masyarakat. Setiap membutuhkan garam untuk keperluan pupuk dan dapurnya masyarakat dapat memperolehnya di desa tersebut. Oleh karena itu desa tersebut hingga kini dinamakan orang Desa Gudang Garam mayoritas penduduknya adalah suku Jawa (Data Primer, 2007).

Status Desa Gudang Garam :

1. Status IDT 1996/1997 : non IDT
2. Status perkotaan : desa
3. Status hukum : definitif (BPS, 2000).

c. Letak Desa

Desa Gudang Garam termasuk ke dalam Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara. Secara administratif Desa Gudang Garam berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Perkebunan Bandar Pinang.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bandar Negeri.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Perkebunan Bandar Pinang.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pergajahan Hulu.

Desa Gudang Garam terbagi atas tiga dusun, yakni Dusun I, Dusun II dan Dusun III. Luas desa secara keseluruhan adalah 365Ha, luas areal hutan kemasyarakatan 200Ha. Areal hutan kemasyarakatan terletak di luar kawasan desa (Data primer, 2007).

UNIVERSITAS MEDAN AREA PERPUSTAKAAN PUSAT

d. Keadaan Biofisik

Desa Gudang Garam memiliki ketinggian antara 187 – 225 mdpl dengan kemiringan 0 - 8% (datar), 15 - 25% (landai). Menurut data curah hujan dari stasiun pengamat curah hujan Badan Meteorologi dan Geofisika, curah hujan di Desa Gudang Garam adalah 2000 – 2500 mm/tahun dan bila dirata – ratakan curah hujannya adalah 185 – 200 mm/bulan, termasuk tipe iklim B (Data Primer, 2007).

e. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk adalah merupakan penyebaran penduduk berdasarkan cara penggolongan atau kelompok tertentu.

1. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Desa Gudang Garam secara keseluruhan adalah 165 kepala keluarga. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin disajikan pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Dusun	Laki – laki		Perempuan	
	Dewasa	Anak – anak	Dewasa	Anak - anak
I	68	34	72	36
II	60	40	64	45
III	80	42	89	42
Jumlah	208	116	225	123

Sumber : Data Monografi Desa Gudang Garam TA 2002 2005

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Suku dan Agama

Penduduk Desa Gudang Garam seluruhnya (100%) memeluk agama Islam. Masyarakat yang tinggal di desa ini pada umumnya adalah suku Jawa berjumlah 650 orang (96,01%). Suku – suku lain yang terdapat di Desa Gudang Garam adalah Simalungun sebesar 1,18%, Toba sebesar 1,03%, Mandailing sebesar 0,59%, Karo sebesar 0,29% dan suku lainnya sebesar 0,88%.

3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Penduduk Desa Gudang Garam pada umumnya bekerja sebagai petani (73,39%). Disamping kegiatan bertani masyarakat desa ada juga yang berprofesi sebagai pegawai (2,95%), buruh (15,79%) dan pedagang (7,1%).

Disamping kegiatan bertani masyarakat desa juga melakukan kegiatan beternak. Jenis ternak yang dipelihara antara lain ayam sebanyak 1420 ekor, kambing sebanyak 239 ekor dan lembu sebesar 198 ekor.

f. Keadaan Fisik

1. Kondisi Jalan

Jalan yang terdapat di Desa Gudang Garam seluruhnya berupa jalan tanah. Panjang jalan tanah yang ada 5 Km. Kondisi jalan tersebut pada musim hujan sulit dilalui oleh kendaraan karena keadaan jalan yang terlalu basah dan licin (Data Monografi Gudang Garam, 2007).

2. Prasarana Umum

Pada tiap dusun sudah terdapat jaringan PLN. Sedang untuk sarana ibadah hanya terdapat satu (1) mesjid di Dusun III. Sarana pendidikan yang tersedia hanya sampai tingkat Sekolah Dasar (SD). Untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi masyarakat harus melanjutkan ke sekolah – sekolah yang ada di luar desa (Data Monografi Gudang Garam, 2007).

Sarana transportasi yang digunakan untuk keluar masuk desa adalah dengan menggunakan jasa ojek atau mobil angkutan yang keluar masuk desa satu kali

UNIVERSITAS MEDAN AREA

sehari (1unit mobil). Sedang sarana transportasi yang digunakan di dalam desa adalah sepeda (210 unit), sepeda motor (68 unit) (Data Monografi Gudang Garam, 2007).

Sumber air bersih yang terdapat di desa yaitu 1 buah sumur bor bantuan pemerintah. Masyarakat mengambil air untuk memasak dan kegiatan lainnya dari sumur tersebut. Setiap peggunaan jasa sumur harus membayar dengan menggunakan tiket yang harganya tergantung pada jenis penggunaan. Pada saat musim hujan masyarakat lebih cenderung menggunakan air yang terdapat di bak – bak penampungan air yang ada di rumah masing – masing.

3. Kondisi Rumah dan Pekarangan

Jumlah rumah yang ada di Desa Gudang Garam 165 buah, terdiri dari 20 rumah permanen, 137 rumah semi permanen dan sisanya 8 rumah tidak permanen. Tiap – tiap rumah memiliki halaman sendiri yang luasnya bervariasi. Halaman ditanami dengan tanaman buah – buahan dan sayur – sayuran yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (Data Primer, 2007).

4. Aksessibilitas

Desa Gudang Garam dapat dicapai dari Medan dengan menggunakan angkutan umum hingga Simpang Kuala Bali selama kurang lebih 2 (dua) jam perjalanan dengan jarak kurang lebih 40 Km dengan kecepatan 80 Km/jam dengan biaya Rp 6000 per orang. Dari Simpang Kuala Bali perjalanan diteruskan dengan menggunakan jasa ojek selama kurang lebih 1 (satu) jam atau sejauh 15 Km dengan biaya Rp 10.000. Lahan hutan kemasyarakatan yang terletak di luar desa dicapai dengan menggunakan rakit dan berjalan kaki. Dapat juga menggunakan sepeda motor dan sepeda (Data Primer, 2007).

5. Tata Guna Tanah

Penggunaan lahan yang dominan di Desa Gudang Garam adalah lahan perkebunan yang luas arealnya sebesar 140Ha atau 39,44% dari luas seluruh desa.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Urutan kedua adalah perladangan dengan luas areal 123Ha (34,65%), urutan ketiga adalah persawahan dengan luas areal 5Ha atau 1,4% dari luas seluruh desa. Di Desa Gudang Garam juga masih terdapat lahan kritis seluas 22Ha atau 6,19% sedangkan sisanya adalah perkampungan seluas 65Ha (18,30%).

Bila dilihat dari luas lahan yang dominan adalah perkebunan yaitu 39,44% dari luas Desa Gudang Garam, maka dapat dikatakan bahwa perkebunan merupakan modal utama untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat desa. Atau jika ketiga bagian luas lahan yaitu perkebunan, perladangan dan persawahan dijumlahkan, maka dapat juga dikatakan bahwa sektor pertanian merupakan mata pencaharian utama penduduk Desa Gudang Garam. Dengan luas sektor pertanian sebesar itu, bila dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga yaitu sebesar 165 kepala keluarga, maka tiap kepala keluarga rata – rata memiliki luas lahan pertanian sebesar 1,6Ha.

4.2. Keadaan Umum Lokasi Hutan Kemasyarakatan

4.2.1. Letak dan Luas

Lokasi hutan kemasyarakatan berada di sebelah Timur Desa Gudang Garam. Secara administratif lokasi hutan kemasyarakatan berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kawasan hutan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Simalungun
- Sebelah Barat berbatasan dengan kawasan hutan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gudang Garam

Berdasarkan pembagian sungai utama dan percabangannya, maka Desa Gudang Garam terdiri atas Daerah Aliran Sungai (DAS) Ular, Sub DAS Sungai Bah Karai.

4.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk dapat mencapai lokasi hutan kemasyarakatan dari desa Gudang Garam ditempuh dengan berjalan kaki sejauh ± 6 km selama 1,5 jam. Jalan yang dilalui berupa jalan setapak dapat juga ditempuh dengan sepeda atau sepeda motor. Untuk sampai ke lokasi hutan kemasyarakatan terlebih dahulu harus menyeberang Sungai

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Ular dengan menggunakan rakit bambu. Jalan menuju lokasi hutan kemasyarakatan dan rakit bambu yang digunakan dibuat secara bergotong royong. Tiap sekali setahun (waktu maksimal) atau apabila rakit sudah rusak, rakit tersebut diganti. Di lokasi hutan kemasyarakatan juga terdapat satu (1) buah tempat/pondok pertemuan yang berfungsi sebagai tempat para anggota kelompok tani berkumpul di lokasi hutan kemasyarakatan pada waktu – waktu tertentu.

4.2.3. Proses Penetapan

Program hutan kemasyarakatan di Sumatera Utara dilaksanakan pada Tahun Anggaran 1996/1997 di Desa Siujan – ujan dan Tolong Buho. Kedua desa tersebut berada di dekat Desa Gudang Garam. Melihat di desa tersebut dilaksanakan program hutan kemasyarakatan, berdasarkan inisiatif dan anemo dari masyarakat Desa Gudang Garam maka mereka mengajukan usul kepada kepala desa untuk melaksanakan program tersebut di desa mereka. Berdasarkan hal tersebut maka mereka mengajukan usul ke Balai Reboisasi Lahan dan Konservasi Tanah (BRLKT). Berdasarkan permohonan dan anemo masyarakat tersebut maka pihak BRLKT mengadakan peninjauan areal yang diusulkan, pemplotan dan pengukuran areal. Setelah dianggap layak, pada Tahun 1998 dilaksanakan program hutan kemasyarakatan di Desa Gudang Garam.

4.2.4. Perkembangan Pengelolaan

Program hutan kemasyarakatan mulai dilaksanakan pada Tahun 1998 di Desa Gudang Garam. Pada tahap pemeliharaan di tiap tahun anggaran pemerintah memberikan bantuan berupa biaya pembersihan lahan, pupuk dan peralatan kerja. Bantuan yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan kesepakatan bersama uang tersebut dibelikan roundup baru kemudian dibagikan kepada peserta hutan kemasyarakatan. Hal ini dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan pemanfaatan bantuan yang diberikan. Bantuan tersebut diberikan selama lima (5) tahun.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Sebelum program hutan kemasyarakatan dilaksanakan di areal tersebut, sudah ada yang mengelola lahan tersebut dengan sistem ladang berpindah. Masyarakat yang mengelola pada umumnya adalah masyarakat yang berasal dari desa tetangga. Pada saat mulai dilaksanakan program hutan kemasyarakatan, masyarakat tersebut dirangkul. Bagi mereka yang bersedia mengikuti peraturan yang ditetapkan diikutsertakan dalam program hutan kemasyarakat. Karena itu ada peserta hutan kemasyarakatan yang berasal dari luar Desa Gudang Garam.

Masyarakat yang menjadi peserta hutan kemasyarakatan adalah masyarakat Desa Gudang Garam yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk ikut serta dalam program tersebut. Masyarakat tersebut dibagi ke dalam tujuh (7) kelompok tani. Masing – masing kelompok tani memiliki anggota rata – rata sebanyak 14 orang. Nama kelompok tani dibuat sesuai dengan nama tumbuh – tumbuhan yang ditanam di lokasi hutan kemasyarakatan, yaitu Mahoni, Sengon, Pinang, Melinjo, Kemiri, Karet dan Durian. Masing – masing kelompok tani memiliki pengurus sendiri – sendiri yang berasal dan dipilih oleh mereka sendiri. Dalam perjalanannya hingga saat ini kelompok tani tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Selain kelompok tani, Peserta HKm juga mendirikan koperasi, sesuai dengan Sk Menhutbun No.677/kpts-II/1998 sebagai salah satu persyaratan pelaksanaan HKm. Namun seperti halnya kelompok tani, koperasi tersebut juga tidak dapat berjalan sesuai dengan fungsinya.

Pola tanam yang digunakan di lahan hutan kemasyarakatan sama. Tanaman yang dominan diusahakan adalah karet, dengan pertimbangan ekonomis bahwa tanaman tersebut paling disukai oleh masyarakat dan memiliki nilai jual yang tinggi. Luas areal yang dimiliki peserta hutan kemasyarakatan bervariasi antara 1 – 4 ha. Luas lahan diberikan berdasarkan kemauan dan kemampuan peserta hutan kemasyarakatan itu sendiri. Pembagian lahan dilakukan oleh pihak BRLKT dan Kepala Desa.

Pada awal pengelolaan (Februari – Juni 1999) petugas dari PT. INHUTANI tinggal di Desa Gudang Garam untuk mengawasi pelaksanaan program hutan kemasyarakatan di lapangan. Selanjutnya kegiatan pengawasan dilakukan oleh tenaga

UNIVERSITAS MEDAN AREA

– tenaga pendamping kelompok tani. Selama pelaksanaan hutan kemasyarakatan dijalankan di Desa Gudang Garam sudah berbagai pihak dan instansi yang melakukan peninjauan dan studi mengenai pelaksanaan hutan kemasyarakatan di desa tersebut. Tahun 2003 merupakan tahun terakhir (tahun kelima) bantuan dari pemerintah diberikan kepada peserta hutan kemasyarakatan. Pada tahun 2004 masyarakat peserta sudah dapat mengambil hasil dari tanaman karet atau getah karet sudah dapat disadap. Sementara tanaman kehutanan yang telah berumur 6 tahun mulai dijarangkan untuk mencegah terganggunya pertumbuhan tanaman karet akibat naungan tanaman kehutanan tersebut.

Sebelum hasil dari tanaman karet diambil, masyarakat mengusahakan tanaman pertanian seperti pisang yang dijual hasilnya untuk menambah penghasilan masyarakat peserta atau sebagai biaya perawatan lahan hutan kemasyarakatan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Karakteristik Responden

5.1.1. Karakteristik Masyarakat Peserta Hutan Kemasyarakatan

Masyarakat Desa Gudang Garam yang menjadi peserta hutan kemasyarakatan berjumlah 70 (tujuh puluh) kepala keluarga. Seluruh masyarakat yang menjadi peserta hutan kemasyarakatan adalah suku Jawa dan memeluk agama Islam. Hal ini terjadi bukan karena adanya diskriminasi dikalangan masyarakat. Masyarakat Desa Gudang Garam mayoritas adalah suku Jawa dan beragama Islam, yang menjadi peserta hutan kemasyarakatan adalah masyarakat desa yang mau dan mampu. Jadi bukan karena adanya diskriminasi suku dan agama.

Usia peserta hutan kemasyarakatan bervariasi mulai dari 23 Tahun hingga 60 Tahun. Usia rata – ratanya adalah 40,8 Tahun. Masyarakat yang menjadi peserta hutan kemasyarakatan tergolong ke dalam masyarakat berusia produktif. Karena itu, mereka masih mau untuk ikut dalam program hutan kemasyarakatan walaupun jarak lokasi hutan kemasyarakatan harus ditempuh sejauh kurang lebih 6 km dengan berjalan kaki, menaiki sepeda atau sepeda motor.

Tingkat pendidikan masyarakat peserta hutan kemasyarakatan masih tergolong rendah, masih ada masyarakat yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 11 orang (15,71%). Tingkat pendidikan masyarakat peserta hutan kemasyarakatan adalah sebagai berikut : tamat SD sebanyak 46 orang (65,71%), tamat SMP sebanyak 13 orang (18,57%). Dari data tersebut diketahui bahwa tingkat pendidikan tertinggi masyarakat peserta hutan kemasyarakatan adalah tamat SMP dan mayoritas peserta berpendidikan hanya sampai SD.

Tingkat pendidikan berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat peserta hutan kemasyarakatan, rendahnya tingkat pendidikan salah satunya disebabkan oleh faktor ekonomi. Walaupun hal tersebut tidaklah mutlak. Faktor utama penyebab rendahnya tingkat pendidikan adalah minimnya tingkat kesadaran penduduk akan pendidikan yang tinggi. Pada waktu – waktu yang lampau orang yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

mampu secara ekonomi belum tentu menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi. Hal ini juga didukung dengan keengganan dari si anak sendiri untuk meneruskan pendidikannya. Keengganan tersebut timbul salah satunya disebabkan karena faktor lingkungan, banyak anak – anak seusia mereka yang tidak melanjutkan pendidikan jadi mereka juga terikut dengan teman – temannya untuk tidak melanjutkan pendidikan.

Selain faktor tersebut, kurangnya sarana transportasi dan tidak adanya sekolah lanjutan SD menyebabkan mereka malas melanjutkan pendidikan. Disamping itu, masyarakat peserta hutan kemasyarakatan yang 100% Jawa pada umumnya sesuai dengan sifat orang Jawa yang selalu "nrimo" atau menerima apa adanya itu seolah – olah pasrah akan hidupnya. Menurut mereka untuk apa sekolah tinggi – tinggi apalagi buat kaum perempuan, karena nantinya harus tunduk pada suami dan mengurus keluarga saja.

Sistem budaya seperti ini tertanam dalam pola pikir masyarakat Desa Gudang Garam. Hal tersebut terus tertanam dari generasi ke generasi. Walaupun orangtua mereka mampu secara ekonomi, karena kurang contoh/teladan dari masyarakat yang berhasil setelah melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, anak – anak mereka atau mereka sendiri jadi enggan untuk masuk ke perguruan tinggi.

Program hutan kemasyarakatan yang dilaksanakan di Desa Gudang Garam melibatkan banyak pihak. Pelaku – pelaku hutan kemasyarakatan tersebut pertama adalah masyarakat sebagai petani, kedua adalah para penyuluh kehutanan, ketiga adalah pengawas. Dengan adanya para penyuluh kehutanan, pendamping dan pengawas yang datang ke desa terjadi interaksi dengan masyarakat. Interaksi tersebut dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Interaksi yang terjadi membawa perubahan pola pikir masyarakat.

Mereka yang datang ke desa baik itu sebagai penyuluh dan pendamping bisa dikatakan memiliki pendidikan yang tinggi. Pada saat mereka berinteraksi dengan masyarakat, masyarakat tersebut menjadi terbuka pola pikirnya dan secara berangsur – angsur mengalami perubahan. Mereka semakin menyadari pentingnya melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi setelah melihat contoh sukses dari orang –

UNIVERSITAS MEDAN AREA

orang yang berpendidikan tinggi seperti para penyuluh, pendamping dan pengawas tersebut. Para orangtua menjadi memiliki keinginan untuk menyekolahkan anak – anak mereka ke tingkat yang lebih tinggi agar paling tidak bisa seperti contoh yang mereka lihat sendiri.

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat peserta hutan kemasyarakatan merupakan kendala bagi pengembangan hutan kemasyarakatan di desa tersebut. Komunikasi dengan mereka akan sangat sulit dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap apa yang dijelaskan juga kurang. Kurangnya pemahaman masyarakat dapat menyebabkan kesalahpahaman/*miss communication* sehingga untuk dapat membentuk partisipasi masyarakat agar mau dan mampu mendukung suatu kegiatan khususnya program hutan kemasyarakatan memerlukan waktu yang relatif lama/sangat sulit.

Tingginya tingkat pendidikan yang dicapai penduduk tampaknya mempunyai hubungan dengan orientasi kerja atau mata pencaharian masyarakat yaitu sebagai petani. Sebagai petani mereka tidak membutuhkan tingkat pendidikan yang tinggi. Hal ini berlangsung turun temurun dari generasi ke generasi. Jika anak mereka tidak berprofesi sebagai petani, ada yang menjadi buruh atau bagi yang melanjutkan ke kejuruan bekerja sesuai dengan bidangnya, tapi kebanyakan dengan jenis pekerjaan yang tidak terlalu membutuhkan/memperhatikan latar belakang pendidikan.
Berdasarkan tingkat pendidikan tersebut masyarakat peserta hutan kemasyarakatan mayoritas bekerja sebagai petani (100%). Mereka tidak memiliki pekerjaan sampingan selain bertani, hanya ada empat orang dari tujuh puluh orang peserta hutan kemasyarakatan yang memiliki pekerjaan sampingan. Jadi mereka menggantungkan seluruh sumber mata pencahariannya dari sektor pertanian.

Menurut lama tinggal di Desa Gudang Garam, masyarakat peserta hutan kemasyarakatan dapat dibagi ke dalam 4 (empat) kelompok, yaitu penduduk yang lama tinggalnya lebih dari 20 tahun sebanyak 51 kepala keluarga, penduduk dengan lama tinggal antara 15 – 20 tahun berjumlah 11 kepala keluarga, penduduk dengan lama tinggal antara 10 – 15 tahun sebanyak 6 kepala keluarga dan yang lama tinggalnya kurang dari lima tahun sebanyak 2 kepala keluarga. Dari hal ini dapat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

dilihat bahwa masyarakat yang telah lama tinggal di desa memiliki kemauan dan kemampuan yang lebih besar untuk ikut serta dalam pelaksanaan program hutan kemasyarakatan.

Jika dilihat dari jumlah tanggungannya, masyarakat peserta hutan kemasyarakatan memiliki jumlah tanggungan antara 0 – 5 orang. Jumlah tanggungan disini adalah jumlah orang yang tinggal di rumah tersebut yang masih menjadi tanggungan kepala keluarga atau tinggal di tempat lain tapi tetap menjadi tanggungan kepala keluarga. Rata – rata jumlah tanggungan yang dimiliki masyarakat peserta hutan kemasyarakatan adalah 3 (tiga) orang. Ini menunjukkan bahwa bentuk keluarga yang ada di Desa Gudang Garam adalah keluarga kecil.

5.1.2. Karakteristik Masyarakat Bukan Peserta Hutan Kemasyarakatan

Masyarakat Desa Gudang Garam yang bukan peserta hutan kemasyarakatan berjumlah 95 kepala keluarga. Masyarakat tersebut 100% memeluk agama Islam dan didominasi oleh suku Jawa (96,84%) sedangkan sisanya adalah suku Batak (3,15%). Usia masyarakat bukan peserta hutan kemasyarakatan berkisar antara 22 – 86 tahun. Masyarakat yang berusia 15 – 55 tahun berjumlah 86,31% dan sisanya masyarakat dengan kelompok usia lebih dari 55 tahun (>55) sebesar 13,68%.

Berdasarkan tingkat pendidikannya, masyarakat bukan peserta hutan kemasyarakatan juga masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah, namun sudah ada masyarakat yang tamat dari perguruan tinggi walaupun cuma 1 orang. Tingkat pendidikan masyarakat bukan peserta hutan kemasyarakatan dapat dikelompokkan seperti yang disajikan dalam Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Bukan Peserta Hutan Kemasyarakatan

Tingkat pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Tidak tamat SD	8	8,42
Tamat SD	61	64,21

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Tamat SMP	21	22,10
Tamat SMU	4	4,2
Tamat PT	1	1,05
Jumlah	95	100

Sumber : Diolah dari data primer

Pada saat ini masyarakat Desa Gudang Garam yang terus melanjutkan pendidikan ke tingkat SMU sudah agak banyak, tetapi yang meneruskan ke tingkat perguruan tinggi hanya segelintir orang saja. Mereka lebih memilih sekolah kejuruan setelah tamat SMP dan langsung mencari kerja atau ada yang langsung berkeluarga. Walaupun orangtua mereka mampu secara ekonomi, karena kurang contoh/teladan dari masyarakat yang berhasil setelah melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, anak-anak mereka atau mereka sendiri jadi enggan untuk masuk ke perguruan tinggi.

Berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat tersebut, maka yang menjadi pekerjaan utama yang dominan bagi masyarakat bukan peserta hutan kemasyarakatan adalah sebagai petani (74,73%). Selain petani pekerjaan utama yang lain yang ditekuni oleh masyarakat bukan peserta hutan kemasyarakatan adalah berdagang (11,57%), karyawan (12,63%) dan beternak (1,05%). Selain sebagai pekerjaan utama, bagi sebagian masyarakat bukan peserta hutan kemasyarakatan bertani merupakan pekerjaan sampingan. Hal ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang berprofesi sebagai karyawan dan pedagang.

Berdasarkan lama tinggal di Desa Gudang Garam, masyarakat bukan peserta hutan kemasyarakatan dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Pembagian kelompok masyarakat tersebut disajikan pada Tabel 3 berikut ini.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Tabel 3. Pengelompokkan masyarakat Desa Gudang Garam Berdasarkan Lama Tinggal

Lama tinggal (tahun)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
< 5	5	5,2
5 – 10	6	6,3
10 –15	7	7,3
15 – 20	6	6,3
> 20	71	74,73
Jumlah	95	100

Sumber : Diolah dari data primer

Jumlah tanggungan masyarakat bukan peserta hutan kemasyarakatan bervariasi, namun rata – rata jumlah tanggungan setiap keluarga adalah tiga orang. Berdasarkan hal ini masyarakat bukan peserta hutan kemasyarakatan juga tergolong ke dalam jenis keluarga kecil.

5.2. Distribusi Pendapatan

5.2.1. Distribusi Pendapatan Total

Pendapatan total masyarakat adalah seluruh pendapatan yang diterima masyarakat (on farm atau off farm) setiap bulannya tanpa memperhitungkan biaya produksi, baik itu yang berasal dari program hutan kemasyarakatan mauppun dari luar program hutan kemasyarakatan. Distribusi pendapatan total masyarakat disajikan pada Tabel 4 berikut ini.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Tabel 4. Distribusi Pendapatan Total Masyarakat Desa Gudang Garam

Pendapatan antar lapisan	Persentase
I (40%)	22,56
II (40%)	38,57
III (20%)	38,54
Indeks Gini	0,05

Sumber : Diolah dari data primer

Dari tabel diatas diperoleh bahwa 40% kelompok berpendapatan terendah menerima 22,56% pendapatan total (>17%). Jika dikaitkan dengan kriteria Bank Dunia, maka distribusi pendapatan total tergolong ketimpangan rendah. Dari perhitungan indeks gini, distribusi pendapatan tergolong ketimpangan rendah (<0,5) seperti tersaji pada Gambar 3.

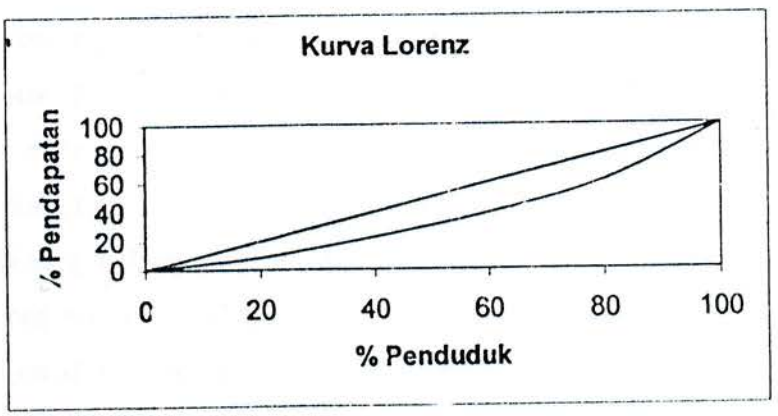

Gambar 3. Kurva Lorenz Distribusi Pendapatan Total Masyarakat Desa Gudang Garam

Pendapatan total masyarakat Desa Gudang Garam adalah sebesar Rp. 100.010.000 tiap bulannya atau rata – rata tiap penduduk menerima Rp. 606. 121,21

UNIVERSITAS MEDAN AREA

/bulan. Pendapatan tersebut berasal dari pendapatan hutan kemasyarakatan (penjualan tanaman sampingan; pisang) dan pendapatan dari luar hutan kemasyarakatan (on farm; karet, padi, coklat dan off farm; berdagang, beternak buruh, karyawan). Besarnya persentase masing – masing komponen pendapatan tersebut disajikan pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Pangsa Komponen Pendapatan Rumah Tangga di Desa Gudang Garam

Komponen pendapatan	Pendapatan/Bulan (Rp)	Persentase Pendapatan (%)
Program hutan kemasyarakatan	6.710.000	6,7
Luar program hutan kemasyarakatan	93.300.000	93,29

Sumber : Diolah dari data primer

Sebanyak 70 (tujuh puluh) kepala keluarga yang ada di Desa Gudang Garam memperoleh pendapatan dengan dan tanpa program hutan kemasyarakatan. Sisanya sebanyak 95 (sembilan puluh lima) kepala keluarga memperoleh pendapatan dari luar program hutan kemasyarakatan. Dari Tabel 5 diperoleh bahwa sebagian besar penduduk mengandalkan pendapatan dari luar program hutan kemasyarakatan. Sebanyak 93,29 persen penduduk memperoleh pendapatannya dari luar program hutan kemasyarakatan dan hanya 6,7 persen penduduk memperoleh pendapatan dari program hutan kemasyarakatan. Hal ini sesuai karena hanya 70 kepala keluarga yang menjadi peserta hutan kemasyarakatan (42,42%).

Besarnya jumlah pendapatan yang diterima masyarakat dari luar program hutan kemasyarakatan disebabkan karena lahan – lahan yang dikelola oleh masyarakat yang berada di luar areal hutan kemasyarakatan merupakan lahan produktif dan sudah menghasilkan (tanamannya sudah berproduksi). Pendapatan yang diperoleh dari program hutan kemasyarakatan itu sendiri relatif sedikit. Ini terjadi karena tanaman pokoknya dalam hal ini karet belum menghasilkan (umurnya belum siap panen) dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

tidak semua masyarakat mengolah/mengusahakan lahannya secara maksimal bahkan ada yang membiarkan/meninggalkannya.

5.2.2. Distribusi Pendapatan Luar Program Hutan Kemasyarakatan (Pendapatan Masyarakat Tanpa Program HKm)

Pendapatan masyarakat Desa Gudang Garam selain dari program hutan kemasyarakatan juga ada yang berasal dari luar program hutan kemasyarakatan, karena tidak semua masyarakat menjadi peserta hutan kemasyarakatan. Pendapatan dari luar program hutan kemasyarakatan berasal dari berbagai kegiatan seperti bertani, berdagang, buruh, beternak dan karyawan. Gambaran mengenai pendapatan dan indeks gini pendapatan dari luar program hutan kemasyarakatan di Desa Gudang Garam disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Distribusi Pendapatan Masyarakat Desa Gudang Garam Dari Luar Program Hutan Kemasyarakatan (Tanpa program Hutan Kemasyarakatan)

Pendapatan antar lapisan	Persentase Pendapatan	Persentase Lahan
I (40%),	21,22	12,3
II(40%)	39,3	34,5
III(20%)	39,46	53,27
Indeks Gini	0,08	0,32

Sumber : Diolah dari data primer

Dari Tabel 6 dapat diinterpretasikan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan relatif terendah, dimana 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima lebih besar 17 persen pendapatan total, dengan indeks gini lebih kecil dari 0,5.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Hal ini terjadi karena pekerjaan yang terdapat/sumber mata pencahariaan yang ada di Desa Gudang Garam cenderung homogen yaitu sebagai petani dengan jenis tanaman yang sama yaitu karet. Perbedaan persentase pendapatan antar lapisan penduduk yaitu perbedaan lapisan I (40%) dengan lapisan II (40%) sebesar 18,08 persen, perbedaan lapisan I dengan lapisan III sebesar 18,24 persen sedangkan perbedaan lapisan II dan III sebesar 0,16 persen. Hal ini juga sejalan dengan distribusi lahan yang terbanyak pada lapisan III (20%). Jadi dapat dikatakan persentase pendapatan berbanding lurus dengan persentase lahan. Semakin banyak/besar persentase kepemilikan lahan maka semakin besar pula persentase pendapatan yang diperoleh. Ini sesuai dengan BPS (2000) yang mengatakan bahwa kesenjangan distribusi pendapatan penduduk di suatu daerah salah satunya disebabkan oleh faktor kepemilikan faktor – faktor produksi
seperti modal dan lahan. Hal tersebut disajikan dengan jelas pada Gambar 4 berikut ini.

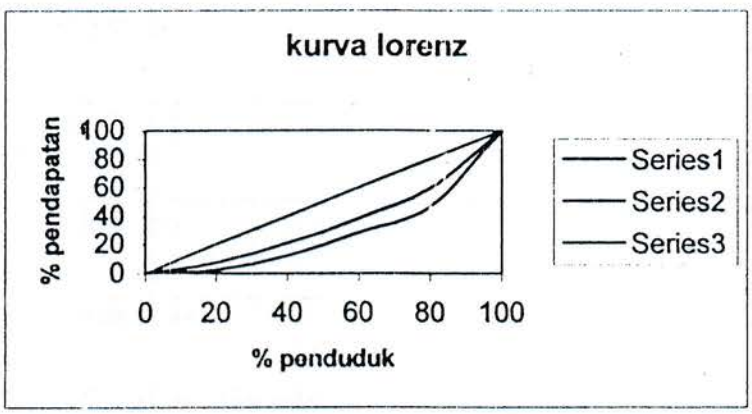

Gambar 4. Kurva Lorenz Distribusi Pendapatan Dari Luar Program Hutan Kemasyarakatan

Gambar 4. menunjukkan bahwa distribusi pendapatan masyarakat lebih merata bila dibandingkan dengan distribusi lahan yang dimiliki oleh masyarakat di luar areal hutan kemasyarakatan. Hal ini dapat dilihat dari kurva distribusi pendapatan yang berada di atas kurva distribusi lahan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

5.2.3. Distribusi Pendapatan Masyarakat Dari Program HKm.

Sumber pendapatan rumah tangga di pedesaan pada garis besarnya berasal dari sektor pertanian. Pendapatan masyarakat Desa Gudang Garam terdiri dari pendapatan program hutan kemasyarakatan dan pendapatan luar program hutan kemasyarakatan. Pendapatan rumah tangga yang ada adalah seluruh pendapatan yang diperoleh tanpa memperhitungkan biaya produksi. Pendapatan dari program hutan kemasyarakatan adalah semua pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan/pengusahaan lahan hutan kemasyarakatan tiap bulannya. Distribusi pendapatan dari program hutan kemasyarakatan disajikan pada Tabel 7 berikut ini.

Tabel 7. Distribusi Pendapatan Masyarakat Desa Gudang Garam "dari" Program Hutan Kemasyarakatan

Pendapatan antar lapisan	Persentase
I (40%)	13,4
II (40%)	26,97
III (20%)	59,61
Indeks gini	0,34

Sumber : Diolah dari data primer

Dari Tabel 7 diatas diperoleh bahwa 40 persen kelompok berpendapatan terendah menerima 13,4 persen pendapatan total. Jika dikaitkan dengan kriteria Bank Dunia, maka distribusi pendapatan dari program hutan kemasyarakatan tergolong ketimpangan sedang. Dari perhitungan indeks gini, distribusi pendapatan tergolong ketimpangan rendah (< 0,5) seperti ditampilkan pada Gambar 5.

Pada aksis horizontal digambarkan jumlah penerima pendapatan dalam bentuk persentase, aksis vertikal menggambarkan bagian dari total pendapatan yang diperoleh atau diterima oleh masing – masing persentase penduduk. Garis diagonal

UNIVERSITAS MEDAN AREA

ditarik dari sudut kiri paling bawah (titik awal) sampai dengan sudut kanan paling atas dari empat persegi yang dibuat. Pada setiap titik di sepanjang garis diagonal digambarkan persentase pendapatan yang diterima dalam jumlah yang persis sama dengan persentase pendapatan dari si penerima. Garis diagonal tersebut menggambarkan "kesamaan yang sempurna" dalam distribusi pendapatan yang diterima oleh masing – masing ukuran kelompok penduduk.

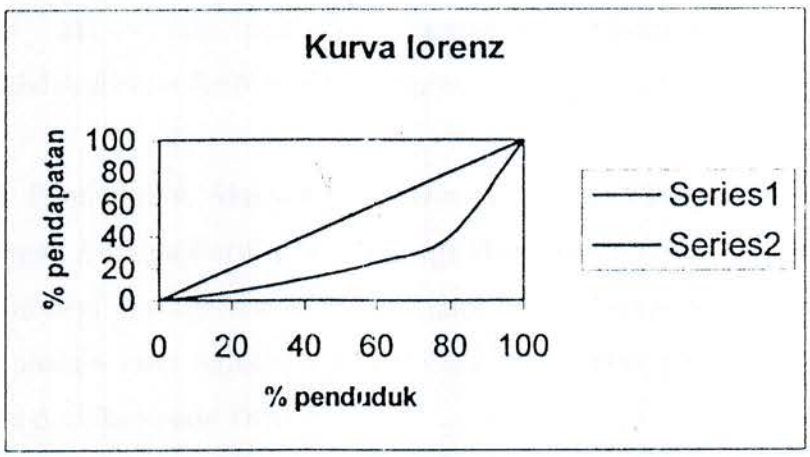

Gambar 5. Kurva Lorenz Distribusi Pendapatan Masyarakat Dari Program HKm

Pada Gambar 5 digambarkan kurva Lorenz dengan menggunakan data yang terdapat pada Tabel 7. Kedua aksis dibagi ke dalam 5 segmen yang sama besar. Semakin jauh garis kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin besar pula tingkat ketidakmerataannya. Untuk melihat tingkat ketidakmerataan (0 – 1) tersebut digunakan koefisien gini.

Terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat yang menjadi peserta hutan kemasyarakatan tidak semuanya mengelola lahan yang mereka miliki. Pada awalnya mereka memang bersemangat untuk mengelola lahan tersebut, tetapi itu dikarenakan mereka mengharapkan bantuan dari pemerintah. Tanaman yang diusahakan antaralain Karet, Mahoni, Gmelina, Pisang dan Coklat. Pada saat bantuan tersebut tidak mencukupi, mereka menjadi malas untuk mengelola lahannya. Akibatnya ada yang mendapat sedikit dari pengusahaan lahan dan ada yang mendapat banyak.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Pendapatan masyarakat dari hutan kemasyarakatan diperoleh dari tanaman sampingan yang dipanen seperti pisang dan coklat. Tanaman karet sebagai tanaman utama baru dapat diambil getahnya pada saat tanaman telah berumur 5 (lima) tahun. Diperkirakan pada tahun – tahun berikutnya setelah tanaman karet dapat diambil hasilnya pendapatan masyarakat dari hutan kemasyarakatan akan mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut akan terus berlanjut seiring dengan pertambahan usia dan pertumbuhan tanaman pokok. Pada saat dilakukan penelitian pendapatan rata – rata masyarakat peserta hutan kemasyarakatan adalah sebesar Rp 565.454 per bulan, sedangkan rata – rata pendapatan masyarakat bukan peserta hutan kemasyarakatan adalah sebesar Rp 606.121 per bulan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA PERPUSTAKAAN PUSAT

5.2.4. Distribusi Pendapatan Masyarakat "Dengan" dan "Tanpa" Program HKm (dengan Adanya Perubahan Strategi Manajemen Hutan)

Perubahan strategi managemen hutan menjadi hutan kemasyarakatan dapat menimbulkan perubahan yang terjadi pada distribusi pendapatan masyarakat desa. Perubahan tersebut disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Distribusi Pendapatan Masyarakat "Dengan" dan "Tanpa" Program Hutan Kemasyarakatan (dengan Perubahan Strategi Manajemen Hutan)

Pendapatan Antar lapisan	Persentase	
	Tanpa Hutan kemasyarakatan	Dengan Hutan kemasyarakatan
I (40%)	21,22	22,56
II (40%)	39,3	38,57
III (20%)	39,46	38,84
Indeks Gini	0,08	0,05

Sumber : Diolah dari data primer

Koefisien gini tanpa hutan kemasyarakatan sebesar 0,08, sedangkan koefisien gini dengan hutan kemasyarakatan adalah 0,05. Data ini menunjukkan bahwa perubahan strategi managemen hutan menjadi hutan kemasyarakatan memberikan pengaruh terhadap penurunan ketimpangan pembagian pendapatan sebesar 0,03. Persentase penerimaan pendapatan total oleh 40 persen berpendapatan rendah juga mengalami perubahan seperti yang terdapat pada Tabel 8.

Dari Tabel 8 tampak bahwa ada perubahan persentase pendapatan pada setiap kelas pendapatan. Penerimaan 40 persen berpendapatan terendah naik sebesar 1,34 persen dari semula, 40 persen berpendapatan menengah turun sebesar 0,73 persen sedangkan 20 persen berpendapatan tinggi turun sebesar 0,62 persen. Koefisien gini ratio pendapatan mengalami penurunan sebesar 0,03 persen. Hal ini menunjukkan adanya penurunan ketimpangan, walaupun tidak begitu nyata seperti ditunjukkan pada Gambar 6.

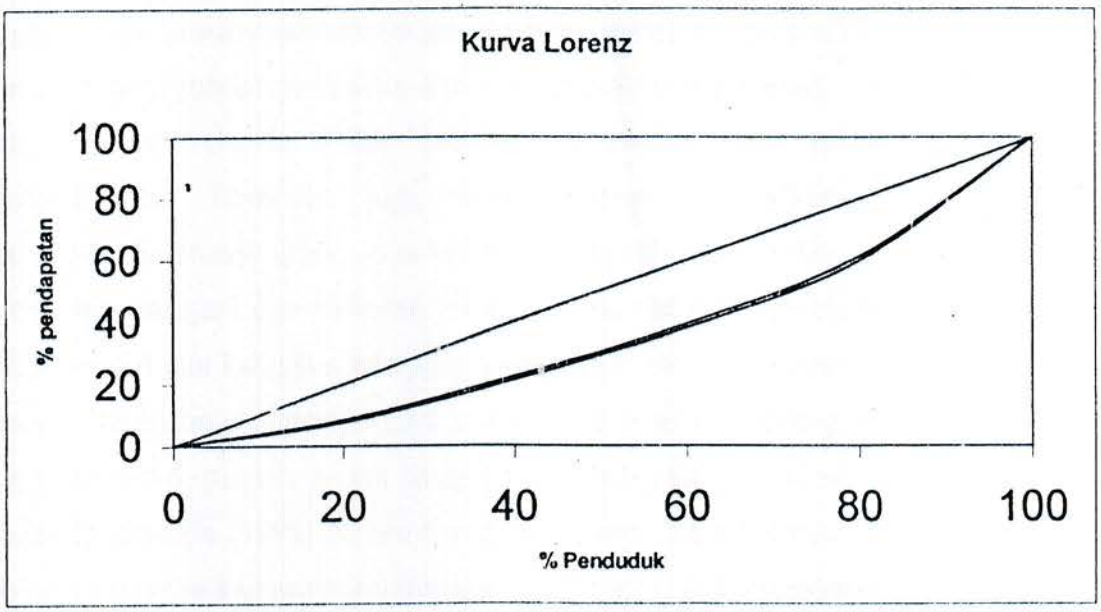

Gambar 6. Kurva Lorenz Distribusi Pendapatan Masyarakat Desa Gudang Garam Dengan dan Tanpa Program Hutan Kemasyarakatan

Ketidaknyataan perubahan penerimaan pendapatan antar kelas tersebut disebabkan karena pembagian lahan hutan yang akan diusahakan pada program hutan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

kemasyarakatan bukan berdasarkan lapisan kelompok pendapatan, akan tetapi lebih kepada siapa yang mau. Pada umumnya yang dikatakan berpunya lebih mau dan rajin serta intensif mengelola lahannya. Misalnya, Pak Rusli yang tergolong berpunya tetap rajin dan bersemangat mengelola lahannya. Tetapi ada juga yang tidak berpunya yang rajin mangelola lahannya seperti Dedek Sulaiman sangat rajin mengelola lahannya bahkan ia tinggal di lahan yang dimilikinya. Masyarakat yang tidak berpunya yang tidak mengelola lahannya mengatakan alasannya karena tidak ada modal untuk mengolah lahan tersebut. Jadi harus yang bermodal yang mengolah lahan atau lebih mungkin hanya bersemangat pada awalnya saja.

Hal ini sesuai dengan ciri – ciri mental masyarakat petani di Indonesia menurut Kluckhon dalam Sayogyo bahwa orang tani di Indonesia bekerja untuk hidup. Ia hanya mempunyai perhatian untuk hari sekarang ini, bagaimana keadaan hari kemudian ia tidak peduli, ia terlampau miskin untuk dapat memikirkan hal itu.

Ketidaknyataan perubahan tersebut dapat juga disebabkan karena pelaksanaan progam hutan kemasyarakatan itu sendiri tidak membawa perubahan pada hal yang lainnya, seperti jumlah penduduk dan sumber pendapatan (jenis). Jumlah penduduk Desa Gudang Garam tidak berubah karena adanya pelaksanaan hutan kemasyarakatan.' Demikian juga halnya dengan struktur/komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, mata pencaharian dan agama. Ini terjadi karena yang menjadi peserta hutan kemasyarakatan adalah masyarakat Desa Gudang Garam sendiri dan kalaupun ada yang berasal dari luar desa mereka tidak tinggal di desa itu. Demikian juga dengan para penyuluh, tenaga pendamping yang datang tidak tinggal menetap, mereka hanya tinggal untuk beberapa waktu saja. Hal ini sesuai dengan Dephutbun (1999) bahwa tenaga pendamping tidak harus tinggal di daerah pelaksanaan hutan kemasyarakatan namun harus tetap melaksanakan tugasnya secara terus menerus dan berkelanjutan.

Jenis sumber mata pencaharian masyarakat Desa Gudang Garam secara keseluruhan tetap sama sebelum dan sesudah adanya program hutan kemasyarakatan yaitu bertani, beternak, berdagang, buruh dan karyawan perkebunan. Ini terjadi karena tidak ada jenis pekerjaan baru yang muncul akibat adanya pelaksanaan hutan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

kemasyarakatan. Seharusnya diharapkan pelaksanaan program hutan kemasyarakatan dapat memberikan manfaat dengan membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat sekitar seperti yang diungkapkan oleh Wardoyo (1997).

5.3. Kontribusi Program Hutan Kemasyarakatan Terhadap Distribusi Pendapatan Masyarakat

5.3.1. Rank Correlation Ratio

Untuk mengetahui hubungan antara pendapatan dengan program hutan kemasyarakatan dan tanpa program hutan kemasyarakatan terhadap pendapatan total digunakan *rank correlation ratio* yang disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Rank Correlation Ratio Komponen Pendapatan Rumah Tangga di Desa Gudang Caram

Komponen Pendapatan	Persentase
Program hutan kemasyarakatan	0,58
Luar program hutan kemasyarakatan	0,99

Sumber : Diolah dari data primer

Dari tabel diatas diperoleh bahwa nilai korelasi pendapatan dari hutan kemasyarakatan terhadap pendapatan total adalah 0,58, sedangkan nilai korelasi pendapatan dari luar hutan kemasyarakatan terhadap pendapatan total adalah sebesar 0,99. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan dari luar program hutan kemasyarakatan dapat menaikkan pendapatan total lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan dari hutan kemasyarakatan. Rendahnya koefisien rank korelasi pendapatan dari hutan kemasyarakatan dibandingkan pendapatan dari luar program hutan kemasyarakatan menunjukkan bahwa asosiasi hubungan pendapatan hutan kemasyarakatan dan pendapatan dari luar hutan kemasyarakatan terhadap pendapatan total kurang begitu baik di desa penelitian.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Nilai korelasi pendapatan dari luar program hutan kemasyarakatan yang hampir mendekati satu (0,99) menunjukkan bahwa pendapatan dari luar hutan kemasyarakatan memiliki korelasi yang tinggi dengan pendapatan total dan sekaligus memberikan dampak bagi ketimpangan pendapatan. Selain itu r(y) hampir sama dengan r(xi), jika r(y) sama dengan r(xi) nilai rank korelasi sama dengan satu (1).

5.3.2. Kontribusi Terhadap Gini ratio Pendapatan Total

Kontribusi komponen pendapatan terhadap ketimpangan pendapatan total secara absolut merupakan hasil perkalian antara pangsa komponen pendapatan, rank korelasi dan gini ratio komponen pendapatan. Hasil perhitungan kontribusi komponen pendapatan yang dinyatakan secara relatif disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Kontribusi Terhadap Gini Ratio Pendapatan Total Rumah Tangga di Desa Gudang Garam

Komponen Pendapatan	Persentase
Program hutan kemasyarakatan	15,17
Luar hutan kemasyarakatan	84,82

Sumber : Diolah dari data primer

Dari Tabel 10 diperoleh bahwa komponen pendapatan dari luar program hutan kemasyarakatan mempunyai kontribusi paling besar terhadap pendapatan total yaitu sebesar 84,82 persen, diikuti dengan komponen pendapatan dari hutan kemasyarakatan sebesar 15,17 persen.

Faktor yang menyebabkan besarnya kontribusi pendapatan dari luar hutan kemasyarakatan daripada pendapatan hutan kemasyarakatan antara lain adalah belum maksimalnya hasil yang diharapkan dari program hutan kemasyarakatan sementara dari lahan di luar hutan kemasyarakatan masyarakat sudah dapat mengambil hasil dengan. Belum maksimalnya hasil yang diperoleh dari lahan hutan kemasyarakatan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

karena tanaman pokok hutan kemasyarakatan yaitu karet belum dapat diambil hasilnya karena umurnya belum mencukupi. Pada tahun 2004 tanaman karet tersebut baru dapat disadap getahnya. Selain karena faktor tersebut, lebih banyaknya jenis pekerjaan di luar hutan kemasyarakatan juga menyebabkan kontribusi pendapatan dari luar hutan kemasyarakatan lebih besar daripada dari hutan kemasyarakatan. Di luar hutan kemasyarakatan masyarakat ada yang berprofesi sebagai buruuh, pedagang, peternak dan karyawan. Sementara dari lahan hutan kemasyarakatan pada saat penelitian ini dilaksanakan peserta hutan kemasyarakatan hanya memperoleh pendapatan dari bertani.

Selain kedua faktor tersebut, curahan tenaga kerja juga mempengaruhi besarnya kontribusi pendapatan. Curahan tenaga kerja pada masyarakat peserta hutan kemasyarakatan lebih besar proporsinya untuk kegiatan di luar hutan kemasyarakatan. Curahan tenaga kerja yang lebih besar di luar hutan kemasyarakatan terjadi karena pada saat penelitian, tanaman yang ada di lahan hutan kemasyarakatan tidak lagi memerlukan perawatan yang intensif karena sudah memasuki tahun kelima

Oleh karena itu, masyarakat menjadi jarang bekerja di lahan tersebut tapi lebih banyak ke lahan mereka yang berada di luar hutan kemasyarakatan. Disamping itu ada beberapa masyarakat yang curahan tenaga kerjanya lebih besar pada lahan hutan kemasyarakatan. Hal tersebut terjadi karena ada masyarakat yang tinggal di lahan mereka seperti Pak Turut dan ada juga karena mereka tidak memiliki lahan lain di luar areal hutan kemasyarakatan.

5.3.3. Elastisitas Gini Ratio

Besarnya perubahan pada komponen pendapatan akan meningkatkan atau menurunkan ketimpangan pendapatan dapat dilihat dari elastisitas gini ratio. Elastistas gini ratio untuk masing – masing komponen pendapatan disajikan pada Tabel 11.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Tabel 11. Elastistas Gini Ratio Komponen Pendapatan Rumah Tangga Masyarakat Desa Gudang Garam.

Komponen Pendapatan	Nilai
Program hutan kemasyarakatan	0,156
Luar Program hutan kemasyarakatan	-0,871

Sumber : Diolah dari data primer

Elastisitas gini ratio untuk pendapatan dari luar hutan kemasyarakatan sebesar – 0,871. Angka elastisitas gini rationya bernilai negatif. Artinya setiap kenaikan pendapatan sepuluh persen akan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 8,71 persen. Elastisitas gini ratio pendapatan dari hutan kemasyarakatan adalah sebesar 0,156, berarti setiap kenaikan pendapatan dari program hutan kemasyarakatan sebesar sepuluh persen akan menaikkan ketimpangan pendapatan sebesar 1,56 persen.

Untuk menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat di Desa Gudang Garam dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan dari luar program hutan kemasyarakatan., Namun, jika sebagian besar masyarakat ikut terlibat dan mengusahakan lahan yang dimiliki maka peningkatan pendapatan dari program hutan kemasyarakatan juga dapat menurunkan ketimpangan pendapatan.

5.4. Dampak Sosial Program Hutan Kemasyarakatan

Dampak adalah setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan akibat adanya aktivitas manusia. Dampak dari suatu aktivitas dapat bersifat sosial, ekonomi dan budaya. Pada pelaksanaan program hutan kemasyarakatan ini dilihat dampak sosial dari program tersebut terhadap kehidupan masyarakat. Dampak sosial terdiri atas dampak sosial ekonomi dan sosial budaya. Hal-hal yang akan dilihat dari segi sosial ekonomi adalah jumlah penduduk, sumber pendapatan (jenis), pendapatan rumah tangga, curahan tenaga kerja. Sedangkan dari segi sosial budaya adalah persepsi, pola

UNIVERSITAS MEDAN AREA

hubungan dengan hutan, status penguasaan lahan/hutan, dan jenis tanaman serta pola hubungan keluarga (Suratmo, 1983).

5.4.1. Persepsi Masyarakat

Secara umum persepsi masyarakat peserta hutan kemasyarakatan terhadap program tersebut dapat dikatakan baik, yang ditunjukkan oleh besarnya persentase jumlah responden yang memiliki persepsi positif terhadap pengembangan program tersebut di daerah mereka. Hal ini terjadi karena keberhasilan dari upaya pembinaan dan penyuluhan yang diberikan baik pada saat persiapan maupun pelaksanaan program. Persepsi disini berupa tanggapan masyarakat yang merupakan kecenderungan bertindak atau berbuat dengan memberikan dukungan atau menolak pelaksanaan program hutan kemasyarakatan. Persepsi dikatakan positif jika mereka mendukung pelaksanaan program hutan kemasyarakatan.

Jika seluruh masyarakat peserta hutan kemasyarakatan mendukung pelaksanaan program hutan kemasyarakatan (persepsi positif) maka seharusnya mereka mengelola lahan yang diberikan kepada mereka dengan baik. Tapi jika kita melihat keadaan di lapangan, tidak semuanya mengusahakan lahan mereka dengan baik. Ada yang sebisanya saja, tapi ada juga yang mengeloia secara maksimal. Diperolehnya hasil wawancara yang demikian bisa saja disebabkan oleh sifat masyarakat yang selalu "manut" atau mengikuti apa yang dikatakan pimpinan/orang yang dihormati. Jika mereka mengatakan baik, masyarakat juga akan mengatakan baik.

Persepsi yang diberikan oleh masyarakat peserta hutan kemasyarakatan juga dipengaruhi oleh alasan mereka ikut ke dalam program hutan kemasyarakatan. Alasan masyarakat Desa Gudang Garam mengikuti program hutan kemasyarakatan bermacam-macam. Diantaranya adalah ingin meningkatkan pendapatan, tidak mempunyai lahan, ikut - ikutan dan karena alasan lainnya. Data tersebut diperoleh berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat Desa Gudang Garam yang masih aktif mengusahakan lahannya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Mereka yang mengikuti program hutan kemasyarakatan dengan alasan ingin meningkakan pendapatan beranggapan dengan bertambahnya lahan yangmereka miliki, maka penghasilan mereka juga akan semakin bertambah. Masyarakat yang memiliki alasan seperti ini memiliki persepsi yang positif. Mereka juga yang rajin mengelola lahan yang dimiliki.

Alasan lainnya masyarakat mengikuti program hutan kemasyarakatan adalah karena mereka tidak mempunyai lahan. Sebelum adanya program hutan kemasyarakatan mereka berprofesi sebagai buruh atau mengelola lahan milik orang lain. Dengan adanya program hutan kemasyarakatan, masyarakat tersebut langsung mengajukan permohonan agar dapat mengikuti program tersebut sehingga mereka bisa memiliki lahan sendiri tanpa harus mengeluarkan uang. Masyarakat dengan alasan demikian juga akan sungguh – sungguh mengelola lahan yang mereka miliki. Karena mereka beranggapan melalui program hutan kemasyarakatan inilah kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan.

Sebagian lagi masyarakat mengikuti program hutan kemasyarakatan hanya karena ikut - ikutan saja. Mereka yang ikut program tersebut karena alasan ikut - ikutan pada umumnya memiliki jumlah tanggungan hanya 1 - 2 orang atau dengan kata lain tanggung jawabnya terhadap keluarga masih kecil/sedikit. Sebagian lagi masyarakat tersebut ikut dengan alasan lain, ada yang katanya diiming - imingi uang, tapi ada juga yang sebelumnya sudah mengelola lahan tersebut sebagai peladang berpindah. Masyarakat dengan alasan demikian pada umumnya memiliki persepsi positif, namun tidak memberikan dukungan yang sepenuhnya terhadap pelaksanaan hutan kemasyarakatan itu sendiri.

Bagi masyarakat yang benar – benar memiliki persepsi positif terhadap pelaksanaan hutan kemasyarakatan di Desa Gudang Garam akan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan hutan kemasyarakatan dengan ikut berpasrtisipasi mengelola lahan yang dimiliki dan memiliki antusias yang tinggi dalam mengikuti setiap kegiatan yang berhubungan dengan hutan kemasyarakatan. Persepsi yang positif tersebut mempengaruhi pola hubungan masyarakat dengan para penyuluh dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

pendamping kelompok tani. Masyarakat juga jadi memiliki rasa ingin tahu yang tinggi setiap para penyuluh atau pendamping datang ke tempat mereka. Rasa ingin tahu tersebut tampak dari kehadiran mereka pada setiap pertemuan – pertemuan yang diadakan.

Persepsi yang positif dari masyarakat peserta hutan kemasyarakatan disamping mempengaruhi hubungan masyarakat peserta hutan kemasyarakatan juga mempengaruhi hubungan masyarakat peserta hutan kemasyarakatan dengan masyarakat bukan peserta hutan kemasyarakatan. Masyarakat peserta hutan kemasyarakatan yang berhasil menimbulkan rasa iri pada sebagian masyarakat bukan peserta hutan kemasyarakatan. Rasa iri tersebut tampak pada saat dilakukan wawancara. Jika kita menanyakan alasan mereka tidak ikut hutan kemasyarakatan, ada yang menjawab pogram hutan kemasyarakatan hanya untuk orang – orang tertentu saja (yang dekat dengan kepala desa) dan alasan lainnya yang diungkapkan dengan nada – nada sindiran.

5.4.2. Pola Hubungan dengan Hutan

Masyarakat peserta hutan kemasyarakatan 100 % adalah suku Jawa, 100 % beragama Islam dan rata-rata telah tinggal di desa tersebut lebih dari dua puluh (20) tahun. Usia mereka 70 % lebih dari 40 tahun dan 30 % berumur antara 20-40 tahun. Jika dilihat dari usia mereka, tergolong ke dalam usia produktif. Hal ini terlihat di lapangan produktivitas mereka masih tinggi, mereka masih memiliki semangat kerja yang tinggi.

Peserta hutan kemasyarakatan yang tinggal di Desa Gudang Garam yang masih aktif mengelola lahannya ada sekitar 20 orang. Ada sebagian peserta hutan kemasyarakatan yang berasal dari luar Desa Gudang Garam, hal ini disebabkan karena pada saat sebelum dilaksanakan program hutan kemasyarakatan sudah ada masyarakat dari desa lain yang sudah mengelola lahan tersebut. Mereka mengelolanya secara berpindah-pindah sebagai lahan pertanian.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Dari hal tersebut diatas dilihat dengan jelas terjadi perubahan pola hubungan dengan hutan. Jika tanpa program hutan kemasyarakatan akses masyarakat desa khususnya Desa Gudang Garam bersifat tertutup maka dengan adanya program hutan kemasyarakatan aksesnya menjadi terbuka. Program hutan kemasyarakatan juga dapat mengatasi persoalan ladang berpindah dan mencegah terjadinya kerusakan hutan. Berubahnya pola hubungan masyarakat dengan hutan ini merubah pola pikir masyarakat terhadap hutan. Masyarakat jadi merasa ikut memiliki hutan dan memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Keberadaan hutan di daerah mereka jadi lebih memberikan manfaat bagi masyarakat.

5.4.3. Status Penguasaan Lahan/Hutan

Dengan adanya program hutan kemasyarakatan terdapat perubahan penguasaan lahan pertanian bagi masyarakat peserta. Lahan yang dimiliki masyarakat peserta menjadi lebih luas atau ada yang tidak memiliki lahan jadi memiliki lahan. Sementara itu untuk masyarakat yang bukan peserta program hutan kemasyarakatan ini tidak membawa perubahan bagi luas lahan mereka. Luas lahan yang diperoleh oleh masing – masing peserta bervariasi, mulai dari satu sampai empat hektar. Perbedaan luas lahan tersebut sampai saat ini tidak membawa pengaruh terhadap pendapatan yang diterima oleh masyarakat peserta. Ada yang memiliki luas lahan sempit tetapi memperoleh penghasilan yang lebih besar dari pada masyarakat yang memiliki luas lahan yang lebih luas. Hal ini terjadi karena pada saat penelitian, penghasilan yang diperoleh masyarakat hanya berasal dari tanaman sampingan. Sementara itu ada masyarakat yang tidak menjual hasil tanaman sampingannya tersebut, mereka hanya menggunakan untuk kepentingan mereka sendiri. Hal ini tidak sesuai dengan BPS (2000) yang mengatakan bahwa faktor – faktor produksi seperti modal mempengaruhi jumlah pendapatan yang diterima.

Perubahan status penguasaan lahan hutan yang menyebabkan perubahan penguasaan luas lahan memberikan pengaruh secara langsung bagi masyarakat peserta hutan kemasyarakatan yang sebelumnya tidak memiliki lahan. Dengan ikut di dalam program hutan kemasyarakatan mereka yang sebelumnya tidak memiliki lahan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

dan bekerja sebagai buruh atau orang upahan di lahan orang lain berubah status menjadi pemilik lahan dan dapat mengusahakan lahannya sendiri. Lahan yang di berikan tidak dimiliki secara tetap oleh masyarakat. Mereka hanya memiliki hak oleh lahan tersebut. Perubahan status tersebut juga meningkatkan status mereka di masyarakat.

Masyarakat peserta hutan kemasyarakatan yang sebelumnya tidak memiliki lahan juga memperoleh keuntungan dengan bertambahnya modal produksi berupa tanah yang mereka miliki. Tanpa mengeluarkan uang untuk membeli tanah sebagai modal produksinya mereka telah memiliki tanah sendiri. Namun hal ini tidak mempengaruhi pola migrasi masyarakat desa, karena sebelumnya masyarakat Desa Gudang Garam jarang yang pergi bekerja ke luar dari desa. Mereka lahir, hidup dan bekerja di Desa Gudang Garam. Pada saat ini sudah ada lahan yang beralih kepemilikannya. Hal ini terjadi dikarenakan ada sebagian pemilik lahan yang menjual lahan yang dimilikinya dengan alasan tidak cukup waktu untuk mengusahakannya.

5.4.4. Pola Usaha Tani/Jenis Tanaman

Jika ditinjau dari pola usaha tani dan jenis tanaman, maka keberadaan program hutan kemasyarakatan dengan menggunakan jenis tanaman kehutanan, pertanian dan perkebunan agaknya merupakan hal baru bagi masyarakat setempat. Masyarakat jadi lebih mengenal tanaman kehutanan seperti mahoni dan jati putih serta cara yang baik untuk menanamnya. Pengetahuan masyarakat mengenai tanaman kehutanan menjadi bertambah. Selain kondisi tersebut, ada juga peserta HKm yang sama sekali tidak mengusahakan lahan yang dimiliki. Lahannya dibiarkan di tumbuhi oleh semak dan tidak terurus.

Jenis tanaman yang dominan ditanam di lahan hutan kemasyarakatan adalah karet. Hal ini sesuai dengan syarat sosial ekonomi komoditas yang harus ditanam pada suatu areal hutan kemasyarakatan, yaitu harus mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan disukai oleh masyarakat. Tanaman karet merupakan tanaman yang diusahakan oleh masyarakat di lahan – lahan mereka di luar hutan kemasyarakatan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

0,99. Kontribusi pendapatan dari hutan kemasyarakatan terhadap pendapatan total sebesar 15,17% dan dari luar hutan kemasyarakatan 84,82%. Elastisitas gini rasio dari hutan kemasyarakatan 0,156 ini berarti setiap kenaikan 10% pendapatan akan menaikkan ketimpangan pendapatan sebesar 1,56%. Elastisitas gini rasio dari luar hutan kemasyarakatan sebesar –0,871 ini berarti setiap kenaikkan 10% pendapatan akan menurunkan pendapatan sebesar 8,71%.

6.2. Saran

a. Agar pembangunan hutan kemasyarakatan tersebut dapat menurunkan ketimpangan pendapatan, maka dalam pelaksanaannya diharapkan kepada Dinas Kehutanan agar memperhatikan hal – hal sebagai berikut : (a) penentuan calon peserta dilakukan secara lebih selektif dengan mengutamakan penduduk setempat, berpenghasilan rendah dan yang benar – benar mau ikut dalam program hutan kemasyarakatan; (b) perlu diperjelas kewajiban dan hak peserta hutan kemasyarakatan akan lahan yang dikelola; (c) pembinaan dan penyuluhan yang berkelanjutan sehingga tercipta hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga hasil yang diinginkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dapat tercapai.
b. Untuk melihat kontribusi program hutan kemasyarakatan terhadap distribusi pendapatan masyarakat secara lebih nyata diharapkan dilakukan penelitian lebih lanjut pada tahun – tahun berikutnya setelah tanaman pokok (karet) dapat dipanen.
c. Agar program hutan kemasyarakatan lebih mengakar dalam kehidupan masyarakat diperlukan sosialisasi program hutan kemasyarakatan terhadap masyarakat sebelum pelaksanaan program agar timbul kesadaran dan keinginan dari masyarakat untuk mengikuti program tersebut.
d. Agar Dinas Kehutanan dan dina terkait lainnya melakukan evaluasi dan proses penetapan terhadap pelaksanaan program hutan kemasyarakatan di Desa Gudang Garam setelah tahap lima tahun pertama ini selesai berjalan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

e. Agar masyarakat Desa Gudang Garam mau lebih serius lagi mengelola setiap lahan yang dimiliki sehingga tidak ada lahan yang dibiarkan terlantar, tidak dikelola.

f. Diharapkan kepada Dinas Kehutanan dan masyarakat desa agar lebih memperbanyak tanaman kehutanan di areal hutan kemasyarakatan daripada tanaman perkebunan dan pertanian.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

DAFTAR PUSTAKA

Amin, A, Syahrumsah, M Sippon. 2002. Tinjauan Sosiologis dan Ekonomis pada Bidang Agribisnis Sektor Kehutanan. Lembaga penelitian Universitas Mulawarman. Samarinda.

Awang, dkk. 2000. Kelembagaan Kehutanan Masyarakat Belajar dari Pengalaman. Aditya Media. Yogyakarta.

Awang, dkk. 2002. Etnoekologi Manusia di Hutan Rakyat. Sinergi Press. Yogyakarta.

Bherata 1982. UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Jakarta.

Dephutbun. 1999. Pemeberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan Melalui Pola Hutan Kemasyarakatan. Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Jakarta.

Dephut. 2001. KepMenHut No. 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan. Departemen Kehutanan. Jakarta.

Gittinger. 1986. Analisa Ekonomi Proyek – Proyek Pertanian. UI Press. Jakarta.

Hallawa, A. 2000. Optimasi Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan di Sumbagut. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehuatnan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam. BPK Pematang Siantar. Medan.

Irawan. Suparmoko. 1987. Ekonomi Pembangunan. Liberty. Yogyakarta.

Jati leksono. 1992. Perubahan Teknologi dan Komponen Ketimpangan Pendapatan Petani di Lampung. Jakarta.

Koesmono. 1999. Menyejahterakan Masyarakat di Sekitar Htan dengan Hutan Kemasyarakatan. Majalah Kehutanan Indonesia. Jakarta.

Krustanto. 2003. Hutan Berbasisis Kemasyarakatan (Solusi Alternatif dalam Otonomi Daerah). www.bonet.co.id/dephut/hutmasya.htm. (23 Januari 2003).

Nazir,M. 1988. Metode Penelitian. Yayasan Ghalia. Jakarta.

Priyo,T. 1999. Hutan Kemasyarakatan Problem Pemerataan dan Kelestarian Hutan. Majalah Kehutanan Indonesia. Jakarta.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Sayogyo dan Pujiwati Sayogyo. 1992. Sosiologi Pedesaan Jilid 1. UGM Press. Yogyakarta.

Soemarwoto,O. 1992. Melestarikan Hutan Tropika Permasalahan, Manfaat dan Kebijakannya. Yayasan Obor Indonesia. Yogyakarta.

Soemarwoto,O. 2000. Kita Masih Harus Merawat Bumi Antologi Kisah Mencintai Lingkungan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Suharjito. 1998. Kehutanan Masyarakat, Beragam Pola Partisipatif Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan. ITB. Bandung.

Suratmo. 2003. Perjalanan Hutan Kemasyarakatan di Indonesia. Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat. Jakarta.

Todaro, M.P. 1995. Ekonomi untuk Negara Berkembang Suatu Pengantar tentang Prinsip – Prinsip, Masalah dan Kebijakan Pembangunan. Bumi Aksara. Jakarta.

Wardoyo, E. 1997. Hutan Kemasyarakatan. Pengelolaan Hutan Partisipatif. PUSKAP FISIP USU, WIM dan Yayasan Sintesa. Medan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Lampiran 1. Data Umum Masyarakat Peserta Hutan Kemasyarakatan

No	Nama Kepala Keluarga	Usia (Thn)	Suku	Agama	Pendidikan	Lama tinggal (Thn)
1	Abdullah	50	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
2	Abd. Majid	40	Jawa	Islam	Tamat SD	15 - 20
3	Abd. Manaf	40	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
4	Abd. Rahman	51	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
5	Abd. Wahid	23	Jawa	Islam	Tamat SD	5 - 10
6	Alimin	51	Jawa	Islam	Tdk Tamat SD	> 20
7	Amiruddin	38	Jawa	Islam	Tamat SD	15 – 20
8	Asmadi	24	Jawa	Islam	Tamat SMP	> 20
9	Badrun	35	Jawa	Islam	Tamat SMP	15 – 20
10	Bambang Sugianto	25	Jawa	Islam	Tamat SMP	> 20
11	Dahlan	30	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
12	Dedek Sulaiman	24	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
13	Edi	28	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
14	Hanafi	43	Jawa	Islam	Tamat SMP	5 – 10
15	Jailani	40	Jawa	Islam	Tdk Tamat SD	15 – 20
16	Jiman	36	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
17	Jumin	53	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
18	Jumirin	55	Jawa	Islam	Tdk Tamat SD	> 20
19	Junaidi	54	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
20	Kamid	45	Jawa	Islam	Tdk Tamat SD	> 20
21	Kardisyah	51	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
22	Kartiman	42	Jawa	Islam	Tamat SD	< 5
23	Kasmo	50	Jawa	Islam	Tamat SD	15 – 20
24	Kusnadi	40	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
25	Lamidi	37	Jawa	Islam	Tamat SMP	> 20
26	Legimin	60	Jawa	Islam	Tdk Tamat SD	> 20
27	Lias	30	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
28	Mamik	33	Jawa	Islam	Tamat SD	15 – 20
29	Misdiono	41	Jawa	Islam	Tamat SD	15 – 20
30	M. Isnan	52	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
31	M. Muklis	60	Jawa	Islam	Tdk Tamat SD	> 20
32	M. Samin	50	Jawa	Islam	Tdk Tamat SD	> 20
33	M. Yahmin	55	Jawa	Islam	Tamat SMP	> 20
34	Ngatimin	42	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
35	Noprianto	25	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20

Sumber : Data Primer (Hasil Penelitian di Lapangan)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

No	Nama Kepala Keluarga	Usia (Thn)	Suku	Agama	Pendidikan	Lama Tinggal (Thn)
36	Nursadi	40	Jawa	Islam	Tdk Tamat SD	> 20
37	Paijo	50	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
38	Ramidi	47	Jawa	Islam	Tamat SMP	> 20
39	Ramlan	35	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
40	Rudi	30	Jawa	Islam	Tamat SD	15 - 20
41	Rusli	45	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
42	Sabri	41	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
43	Salikin	37	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
44	Samuddin	40	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
45	Sapon	32	Jawa	Islam	Tamat SD	5 – 10
46	Sarifuddin	29	Jawa	Islam	Tamat SMP	5 - 10
47	Satimin	30	Jawa	Islam	Tamat SMP	> 20
48	Siman	33	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
49	Solim	41	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
50	Subari	31	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
51	Subur	51	Jawa	Islam	Tdk Tamat SD	> 20
52	Sugiono	31	Jawa	Islam	Tamat SMP	5 - 10
53	Sukimin	50	Jawa	Islam	Tdk Tamat SD	> 20
54	Sulaiman	47	Jawa	Islam	Tdk Tamat SD	> 20
55	Sunar	60	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
56	Supiono	45	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
57	Suprianto	45	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
58	Suriadi	29	Jawa	Islam	Tamat SD	< 5
59	Suro	34	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
60	Suryanto	24	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
61	Sutrisno	36	Jawa	Islam	Tamat SMP	15 - 20
62	Suwandi	35	Jawa	Islam	Tamat SD	15 - 20
63	Suyono	43	Jawa	Islam	Tamat SD	15 - 20
64	Tarsudi	47	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
65	Tri Purwanto	51	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
66	Turut	55	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
67	Warmin	54	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
68	Wasiman	30	Jawa	Islam	Tamat SMP	> 20
69	Wondo	33	Jawa	Islam	Tamat SMP	> 20
70	Yahmin .S	42	Jawa	Islam	Tamat SD	5 - 10

Sumber : Data Primer (Hasil Penelitian di Lapangan)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Lampiran 2. Pekerjaan, Jumlah Tanggungan, Alasan Ikut HKm dan Persepsi Masyarakat Peserta Hutan Kemasyarakatan

No	Nama Kepala Keluarga	Pekerjaan	Jumlah Tanggungan (Orang)	Alasan Ikut Hutan kemasyarakatan	Persepsi
1	Abdullah	Bertani	3	d	+
2	Abd. Majid	Bertani	3	d	+
3	Abd. Manaf	Bertani	4	d	+
4	Abd. Rahman	Bertani	3	d	+
5	Abd. Wahid	Bertani/beternak	3	c	+
6	Alimin	Bertani	1	c	+
7	Amiruddin	Bertani	3	d	+
8	Asmadi	Bertani/buruh	1	d	+
9	Badrun	Bertani	2	d	-
10	Bambang Sugianto	Bertani	2	d	-
11	Dahlan	Bertani	3	d	
12	Dedek Sulaiman	Bertani	-	c	+
13	Edi	Bertani	1	d	+
14	Hanafi	Bertani	4	d	+
15	Jailani	Bertani	5	d	+
16	Jiman	Bertani	3	a	+
17	Jumin	Bertani	1	a	+
18	Jumirin	Bertani	4	d	+
19	Junaidi	Bertani	4	d	+
20	Kamid	Bertani	4	d	+
21	Kardisyah	Bertani	5	d	+
22	Kartiman	Bertani	5	c	+
23	Kasmo	Bertani	5	c	+
24	Kusnadi	Bertani	3	d	+
25	Lamidi	Bertani	3	d	+
26	Legimin	Bertani	2	d	+
27	Lias	Bertani	4	d	-
28	Mamik	Bertani	3	d	+
29	Misdiono	Bertani	5	d	+
30	M. Isnan	Bertani	5	d	+
31	M. Muklis	Bertani	4	d	+
32	M. Samin	Bertani	3	d	+
33	M. Yahmin	Bertani	4	d	+
34	Ngatimin	Bertani	4	d	+
35	Noprianto	Bertani	1	d	+

Sumber : Data Primer(Hasil Penelitian di Lapangan)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

No	Nama Kepala Keluarga	Pekerjaan	Jumlah Tanggungan (Orang)	Alasan Ikut Hutan Kemasyarakatan	Persepsi
36	Nursadi	Bertani	5	d	+
37	Paijo	Bertani	3	d	+
38	Ramidi	Bertani/kades	3	d	+
39	Ramlan	Bertani	3	a	+
40	Rudi	Bertani	3	d	-
41	Rusli	Bertani	4	c	+
42	Sabri	Bertani	4	d	+
43	Salikin	Bertani	3	d	+
44	Samuddin	Bertani	5	c	+
45	Sapon	Bertani	3	d	+
46	Sarifuddin	Bertani	2	d	-
47	Satimin	Bertani	2	a	-
48	Siman	Bertani	3	a	+
49	Solim	Bertani	4	d	+
50	Subari	Bertani	3	d	+
51	Subur	Bertani/pengobatan alternatif	5	c	+
52	Sugiono	Bertani	2	d	+
53	Sukimin	Bertani	5	d	+
54	Sulaiman	Bertani	3	d	+
55	Sunar	Bertani	4	f	+
56	Supiono	Bertani	4	a	+
57	Suprianto	Bertani	4	d	+
58	Suriadi	Bertani	2	d	+
59	Suro	Bertani	3	d	+
60	Suryanto	Bertani	2	a	+
61	Sutrisno	Bertani	3	d	+
62	Suwandi	Bertani	3	d	-
63	Suyono	Bertani	3	d	-
64	Tarsudi	Bertani	4	a	+
65	Tri Purwanto	Bertani	5	a	+
66	Turut	Bertani	2	f	+
67	Warmin	Bertani	5	d	+
68	Wasiman	Bertani	3	d	-
69	Wondo	Bertani	3	d	+
70	Yahmin .S	Bertani	4	c	+

Sumber : Data Primer (Hasil Penelitian di Lapangan)

Keterangan :

1. a = Ikut-ikutan
2. b = sebagai pekerjaan sampingan
3. c = tidak punya lahan
4. d = ingin meningkatkan pendapatan
5. e = dipaksa (untuk kepentingan tertentu)
6. f = lainnya (dibayari, sebelumnya sudah di lahan itu)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Lampiran 3. Luas Lahan, Curahan Tenaga Kerja dan Pendapatan Masyarakat Peserta Hutan Kemasyarakatan

No	Nama Kepala Keluarga	Luas Lahan (Ha)		Curahan Tenaga Kerja (Jam/Thn)		Pendapatan PerBulan (Rp)	
		HKm	Luar HKm	HKm	Luar HKm	HKm	Luar HKm
1	Abdullah	1	1,5	288	1092	20.000	700.000
2	Abd. Majid	2	1	728	1092	400.000	450.000
3	Abd. Manaf	4	1	1456	728	100.000	400.000
4	Abd. Rahman	4	2	728	1456	400.000	1.200.000
5	Abd. Wahid	2	2	312	2080	50.000	176.000
6	Alimin	3	0,6	312	1248	50.000	448.000
7	Amiruddin	2	0,5	208	1040	40.000	200.000
8	Asmadi	4	4	864	1080	50.000	600.000
9	Badrun	1	0,2	208	1040	50.000	200.000
10	Bambang Sugianto	2	0,14	192	1092	50.000	220.000
11	Dahlan	1	0,3	192	1248	50.000	320.000
12	Dedek Sulaiman	2	-	1456	192	500.000	150.000
13	Edi	1	1	192	1456	30.000	625.000
14	Hanafi	4	0,16	1248	728	120.000	300.000
15	Jailani	1	1	96	1456	40.000	450.000
16	Jiman	1	1	96	1080	40.000	300.000
17	Jumin	4	1	312	1820	120.000	350.000
18	Jumirin	4	1	520	1248	120.000	160.000
19	Junaidi	1	0,8	260	1040	80.000	380.000
20	Kamid	2	0,6	728	1092	50.000	400.000
21	Kardisyah	4	1	416	1456	100.000	700.000
22	Kartiman	1	1	96	1248	20.000	225.000
23	Kasmo	3	2	260	1820	40.000	450.000
24	Kusnadi	2	0,5	312	1248	40.000	600.000
25	Lamidi	2	2	312	1456	80.000	800.000
26	Legimin	2	0,7	192	1248	40.000	350.000
27	Lias	2	0,4	192	1080	40.000	575.000
28	Mamik	1	0,8	260	1040	50.000	450.000
29	Misdiono	1	1	96	1820	20.000	475.000
30	M. Isnan	1	1	96	1092	30.000	450.000
31	M. Muklis	2	1	728	1092	100.000	300.000
32	M. Samin	1	0,4	96	1030	20.000	450.000
33	M. Yahmin	4	0,8	864	1080	200.000	350.000
34	Ngatimin	2	1	1248	1092	280.000	240.000
35	Noprianto	1	2	192	1080	50.000	400.000

Sumber : Data Primer (Hasil Penelitian di Lapangan)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

No	Nama Kepala Keluarga	Luas Lahan (Ha)		Curahan Tenaga Kerja (Jam/Thn)		Pendapatan PerBulan (Rp)	
		HKm	Luar HKm	HKm	Luar HKm	HKm	Luar HKm
36	Nursadi	2	1	312	1820	120.000	400.000
37	Paijo	1	1	96	1456	20.000	500.000
38	Ramidi	3	1	624	1030	200.000	700.000
39	Ramlan	4	1,5	288	1080	50.000	600.000
40	Rudy	2	0,8	96	1248	50.000	675.000
41	Rusli	4	12	780	1092	500.000	700.000
42	Sabri	1	1	96	1456	20.000	350.000
43	Salikin	1	0,4	288	1030	40.000	200.000
44	Samuddin	1	2	208	1092	40.000	500.000
45	Sapon	1	1	192	1080	30.000	550.000
46	Sarifuddin	1	2	192	1456	30.000	520.000
47	Satimin	1	0,8	192	2028	40.000	400.000
48	Siman	2	0,5	208	1820	50.000	200.000
49	Solim	1	1	96	1040	30.000	300.000
50	Subari	1	0,6	96	1248	30.000	650.000
51	Subur	4	1	520	1820	50.000	500.000
52	Sugiono	4	0,8	728	1030	50.000	500.000
53	Sukimin	1	0,8	192	1248	30.000	600.000
54	Sulaiman	1	0,4	288	1092	40.000	400.000
55	Sunar	4	2	312	312	100.000	200.000
56	Supiono	2	0,5	208	1040	40.000	400.000
57	Suprianto	2	1	312	1030	120.000	300.000
58	Suriadi	2	1	520	1456	80.000	600.000
59	Suro	2	1	624	1080	240.000	600.000
60	Suryanto	1,5	0,48	312	1248	50.000	300.000
61	Sutrisno	1	1	96	2028	50.000	500.000
62	Suwandi	2	1	96	2028	40.000	600.000
63	Suyono	1	2	96	1456	20.000	300.000
64	Tarsudi	1	1,5	144	2028	50.000	750.000
65	Tri Purwanto	3	1	312	1248	100.000	400.000
66	Turut	6	0,6	2028	728	600.000	0
67	Warmin	1	0,48	144	2028	50.000	475.000
68	Wasiman	1	2	96	2028	30.000	625.000
69	Wondo	1	1	288	1820	200.000	500.000
70	Yahmin. S	2	-	1456	445	50.000	200.000

Sumber : Data Primer (Hasil Penelitian di Lapangan)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Lampiran 4. Data Umum Masyarakat Bukan Peserta Hutan Kemasyarakatan

No	Nama Kepala Keluarga	L/P	Usia (Thn)	Suku	Agama	Pendidikan	Lama Tinggal (Thn)
1	Abd. Basri Tambunan	L	51	Batak	Islam	Tamat SMP	> 20
2	Abd. Muin	L	86	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
3	Agus Salim	L	40	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
4	Angroh	L	45	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
5	Anwar	L	50	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
6	Anto	L	35	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
7	Armadan	L	30	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
8	Aminto	L	31	Jawa	Islam	Tamat SMP	> 20
9	Bayuddin Sinaga	L	40	Batak	Islam	Tamat SMU	5 - 10
10	Budi Ardiansah	L	28	Jawa	Islam	Tamat SMU	> 20
11	Daryono	L	37	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
12	Fadli	L	39	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
13	Fikri	L	41	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
14	Gamin	L	58	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
15	Gimin	L	52	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
16	Hartinah	P	54	Jawa	Islam	Tdk Tamat SD	< 5
17	Husman	L	24	Jawa	Islam	Tamat SMP	15 - 20
18	Hendro	L	40	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
19	Ilham	L	35	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
20	Iswanto	L	33	Jawa	Islam	Tamat SMP	> 20
21	Iwan Sahputra	L	25	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
22	Iyem	P	60	Jawa	Islam	Tdk Tamat SD	> 20
23	Jumaira	P	37	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
24	Jumari	L	52	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
25	Juminem	P	60	Jawa	Islam	Tdk Tamat SD	> 20
26	Jumiyem	P	55	Jawa	Islam	Tdk Tamat SD	15 - 20
27	Karsiem	P	52	Jawa	Islam	Tdk Tamat SD	10 - 15
28	Kasiana	P	50	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
29	Kaswanto	L	43	Jawa	Islam	Tamat SMU	> 20
30	Kasiman	L	40	Jawa	Islam	Tamat SD	10 - 15
31	Lasmini	P	72	Jawa	Islam	Tdk Tamat SD	> 20
32	Legianto	L	40	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
33	Miswana	L	40	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
34	Mahmud	L	60	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
35	Mukimin	L	55	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
36	Musmari Bejo	L	47	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
37	Mardan Sipayung	L	30	Batak	Islam	Tamat SMP	> 20
38	M. Didi	L	42	Jawa	Islam	Tamat SD	15 - 20
39	Mulyadi	L	45	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
40	Misdar	L	34	Jawa	Islam	Tamat SMP	5 -10
41	Misno	L	30	Jawa	Islam	Tamat SMP	> 20
42	Ngadimin	L	35	Jawa	Islam	Tamat SD	5 -10
43	Nurahmad	L	40	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
44	Nurhadiah	P	39	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
45	Nurmans	L	49	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20

Sumber : Data Primer (Hasil Penelitian di Lapangan)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

No	Nama Kepala Keluarga	L/P	Usia (Thn)	Suku	Agama	Pendidikan	Lama Tinggal (Thn)
46	Paena	P	47	Jawa	Islam	Tamat SD	5 -10
47	Parjan	L	50	Jawa	Islam	Tdk Tamat SD	> 20
48	Parlan	L	32	Jawa	Islam	Tamat SMU	> 20
49	Parno	L	41	Jawa	Islam	Tdk Tamat SD	15 - 20
50	Poniman	L	44	Jawa	Islam	Tamat SD	10 - 15
51	Purwanto	L	30	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
52	Purwono	L	34	Jawa	Islam	Tamat SMP	> 20
53	Riawan	L	55	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
54	Rahiman	L	40	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
55	Rismin	L	72	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
56	Rudi Irawan	L	35	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
57	Sahri	L	35	Jawa	Islam	Tamat SMP	10 - 15
58	Sahlan	L	30	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
59	Sagiman	L	64	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
60	Saimin	L	45	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
61	Sairin	L	45	Jawa	Islam	Tamat SD	10 - 15
62	Saman	L	42	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
63	Samir	L	57	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
64	Sabariah	P	50	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
65	Satim	L	56	Jawa	Islam	Tamat SD	5 --10
66	Samsina	P	33	Jawa	Islam	Tamat SD	10 - 15
67	Santaruna	L	83	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
68	Sariaman	L	52	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
69	Sarmidi	L	30	Jawa	Islam	Tamat SD	< 5
70	Sudarno	L	32	Jawa	Islam	Tamat SMP	> 20
71	Sugiati	P	35	Jawa	Islam	Tamat SMP	> 20
72	Sukirman	L	40	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
73	Suherman	L	47	Jawa	Islam	Tamat SMP	15 - 20
74	Sunardi	L	38	Jawa	Islam	Tamat SMP	> 20
75	Suparmin	L	47	Jawa	Islam	Tamat SD	10 - 15
76	Supri	L	22	Jawa	Islam	Tamat SD	< 5
77	Susi	P	24	Jawa	Islam	Tamat SD	< 5
78	Sutikno	L	30	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
79	Supriadi	L	41	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
80	Sutirto	L	28	Jawa	Islam	Tamat SMP	> 20
81	Sumanto	L	33	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
82	Sutimin	L	45	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
83	Sutrisno	L	30	Jawa	Islam	Tamat SMP	> 20
84	Surya Wijaya	L	30	Jawa	Islam	Tamat PT	< 5
85	Suryono	L	39	Jawa	Islam	Tamat SMP	> 20
86	Supardi	L	45	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
87	Susanto	L	30	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
88	Suwardi	L	33	Jawa	Islam	Tamat SMP	5 - 10
89	Sukarji	L	60	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
90	Wanti	P	23	Jawa	Islam	Tamat SMP	> 20
91	Warno	L	47	Jawa	Islam	Tamat SMP	> 20
92	Waimun	L	48	Jawa	Islam	Tamat SMP	> 20
93	Usman	L	55	Jawa	Islam	Tamat SD	15 - 20
94	Yanto	L	46	Jawa	Islam	Tamat SD	> 20
95	Z. Pasaribu	L	68	Jawa	Islam	Tamat SMP	> 20

Sumber : Data Primer (Hasil Penelitian di Lapangan)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Lampiran 5. Jumlah Tanggungan, Luas Lahan dan Pendapatan Masyarakat Bukan Peserta Hutan Kemasyarakatan

No	Nama Kepala Keluarga	Jumlah Tanggungan (Orang)	Luas Lahan (Ha)	Pekerjaan	Pendapatan PerBulan (Rp)
1	Abd. Basri Tambunan	5	1	Karyawan	675.000
2	Abd. Muin	1	-	Berdagang	150.000
3	Agus Salim	3	1	Bertani	725.000
4	Angroh	3	1,5	Bertani	800.000
5	Anwar	4	0,8	Bertani	368.000
6	Anto	2	1	Bertani	525.000
7	Armadan	3	1,2	Bertani	625.000
8	Aminto	4	1	Berdagang	200.000
9	Bayuddin Sinaga	4	0,5	Bertani	120.000
10	Budi Ardiansah	2	1	Bertani/berdagang	1.500.000
11	Daryono	4	0,12	Bertani	450.000
12	Fadli	3	0,5	Bertani	475.000
13	Fikri	4	2	Bertani/beternak	1.600.000
14	Gamin	4	1	Berdagang/Bertani	1.400.000
15	Gimin	3	0,4	Bertani/buruh	714.000
16	Hartinah	2	1	Bertani	574.000
17	Husman	2	1	Bertani	400.000
18	Hendro	5	0,6	Bertani	500.000
19	Ilham	3	2	Bertani	1.050.000
20	Iswanto	4	0,8	Bertani	500.000
21	Iwan Sahputra	1	2	Bertani	1.025.000
22	Iyem	-	0,4	Bertani	300.000
23	Jumaira	4	1,5	Bertani	200.000
24	Jumari	2	0,2	Bertani	200.000
25	Juminem	1	0,4	Bertani	450.000
26	Jumiyem	-	0,6	Bertani	425.000
27	Karsiem	1	-	Karyawan	390.000
28	Kasiana	3	2,5	Bertani	1.000.000
29	Kaswanto	4	1	Bertani/berdagang	500.000
30	Kasiman	3	1	Bertani	600.000
31	Lasmini	2	0,8	Bertani	148.000
32	Legianto	5	4	Bertani	400.000
33	Miswana	3	0,08	Karyawan/Bertani	600.000
34	Mahmud	4	2	Bertani	450.000
35	Mukimin	5	1	Bertani	550.000
36	Musmari Bejo	3	1	Bertani	375.000
37	Mardan Sipayung	2	-	Berdagang	1.500.000
38	M. Didi	4	1	Karyawan/Bertani	1.160.000
39	Mulyadi	4	0,8	Bertani	485.000
40	Misdar	3	3	Bertani	500.000
41	Misno	2	2	Bertani	435.000
42	Ngadimin	2	0,2	Bertani	368.000
43	Nurahmad	3	1	Bertani	350.000
44	Nurhadiah	3	0,2	Berdagang/Bertani	700.000
45	Nurmans	3	-	Karyawan/Jasa air	500.000

Sumber : Data Primer (Hasil Penelitian di Lapangan)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

No	Nama Kepala Keluarga	Jumlah Tanggungan (Orang)	Luas Lahan (Ha)	Pekerjaan	Pendapatan PerBulan (Rp)
46	Paena	3	0,6	Bertani	414.000
47	Parjan	5	1,5	Bertani	525.000
48	Parlan	4	0,5	Bertani/bangunan	1.000.000
49	Parno	4	0,6	Karyawan/beternak	507.000
50	Poniman	5	-	Karyawan	600.000
51	Purwanto	3	1	Bertani	400.000
52	Purwono	5	1	Bertani/berdagang	1.132.000
53	Riawan	5	3	Bertani	1.075.000
54	Rahiman	4	0,16	Bertani	350.000
55	Rismin	1	0,44	Bertani	450.000
56	Rudi Irawan	2	0,8	Bertani	380.000
57	Sahri	3	0,12	Berdagang	400.000
58	Sahlan	3	20	Bertani	1.600.000
59	Sagiman	5	1,5	Karyawan/Bertani	1.550.000
60	Saimin	2	0,6	Bertani	1.000.000
61	Sairin	5	0,5	Bertani/berdagang	1.035.000
62	Saman	5	-	Berdagang	200.000
63	Samir	4	2,44	Bertani	750.000
64	Sabariah	3	0,2	Berdagang	600.000
65	Satim	2	0,6	Bertani	500.000
66	Samsina	5	3,2	Bertani/beternak	1.112.000
67	Santaruna	4	0,5	Bertani	200.000
68	Sariaman	3	1	Karyawan/bertani	1.210.000
69	Sarmidi	3	0,2	Bertani/bangunan	1.000.000
70	Sudarno	3	-	Karyawan	600.000
71	Sugiati	2	0,08	Bertani	450.000
72	Sukirman	2	1	Bertani	800.000
73	Suherman	5	1	Bertani	400.000
74	Sunardi	4	1	Bertani	400.000
75	Suparmin	2	0,8	Bertani	360.000
76	Supri	2	0,08	Bertani	160.000
77	Susi	2	2	Bertani	400.000
78	Sutikno	3	1,5	Bertani	450.000
79	Supriadi	4	4	Bertani	1.200.000
80	Sutirto	2	1	Bertani	475.000
81	Sumanto	3	0,8	Bertani	465.000
82	Sutimin	5	1	Bertani	425.000
83	Sutrisno	2	1	Berdagang	200.000
84	Surya Wijaya	3	2	Beternak	1.800.000
85	Suryono	3	2	Berdagang	1.500.000
86	Supardi	4	2	Bertani	600.000
87	Susanto	3	4	Bertani	1.000.000
88	Suwardi	3		Berdagang	1.300.000
89	Sukarji	8	0,36	Bertani	400.000
90	Wanti	2	0,6	Bertani	920.000
91	Warno	4	2	Bertani	1.312.000
92	Waimun	4		Karyawan	600.000
93	Usman	2	0,4	Bertani	250.000
94	Yanto	5	1	Karyawan/Bertani	742.000
95	Z. Pasaribu	5	1	Bertani	300.000

Sumber : Data Primer (Hasil Penelitian di Lapangan)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

PETA DESA GUDANG GARAM

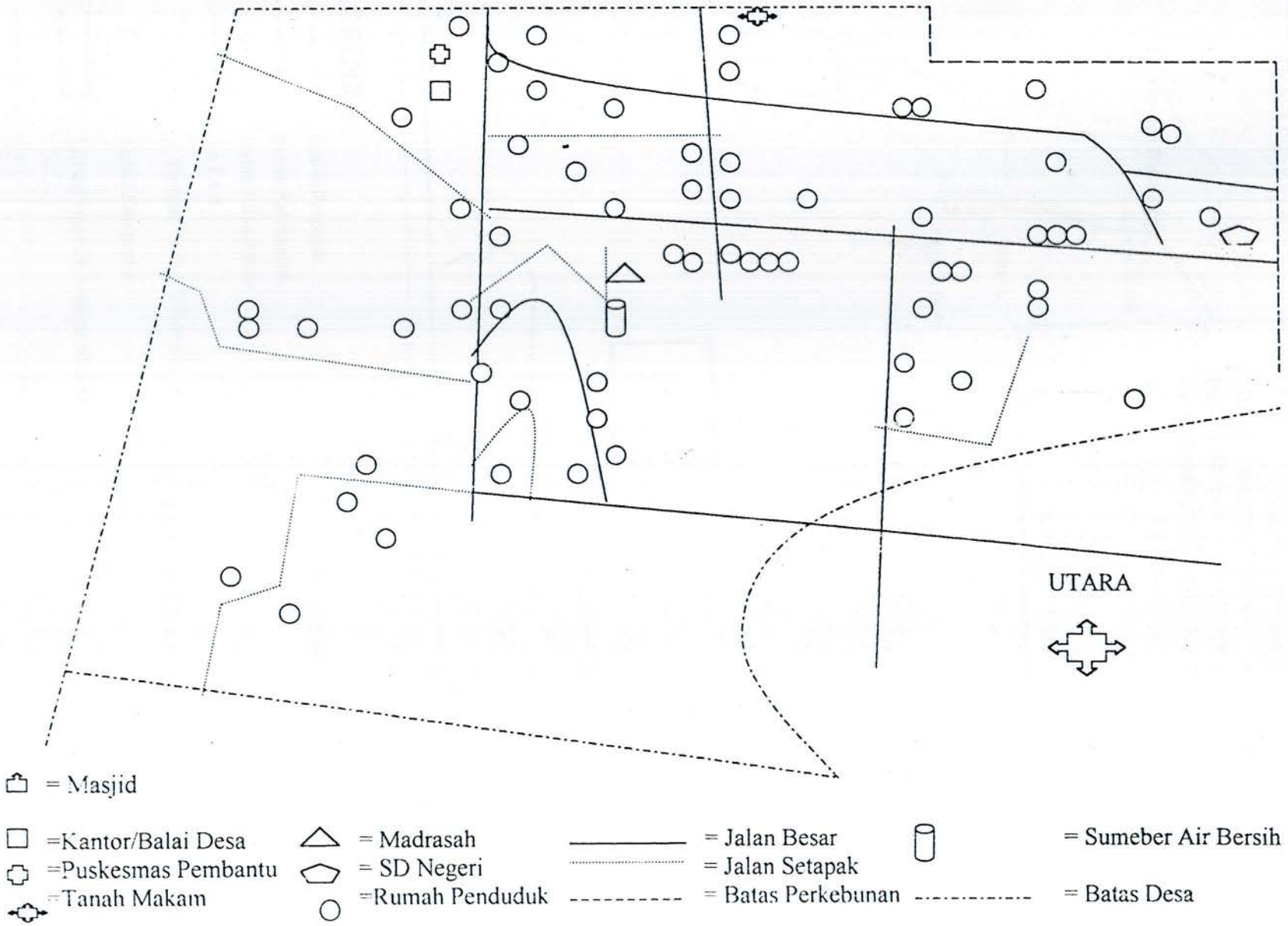

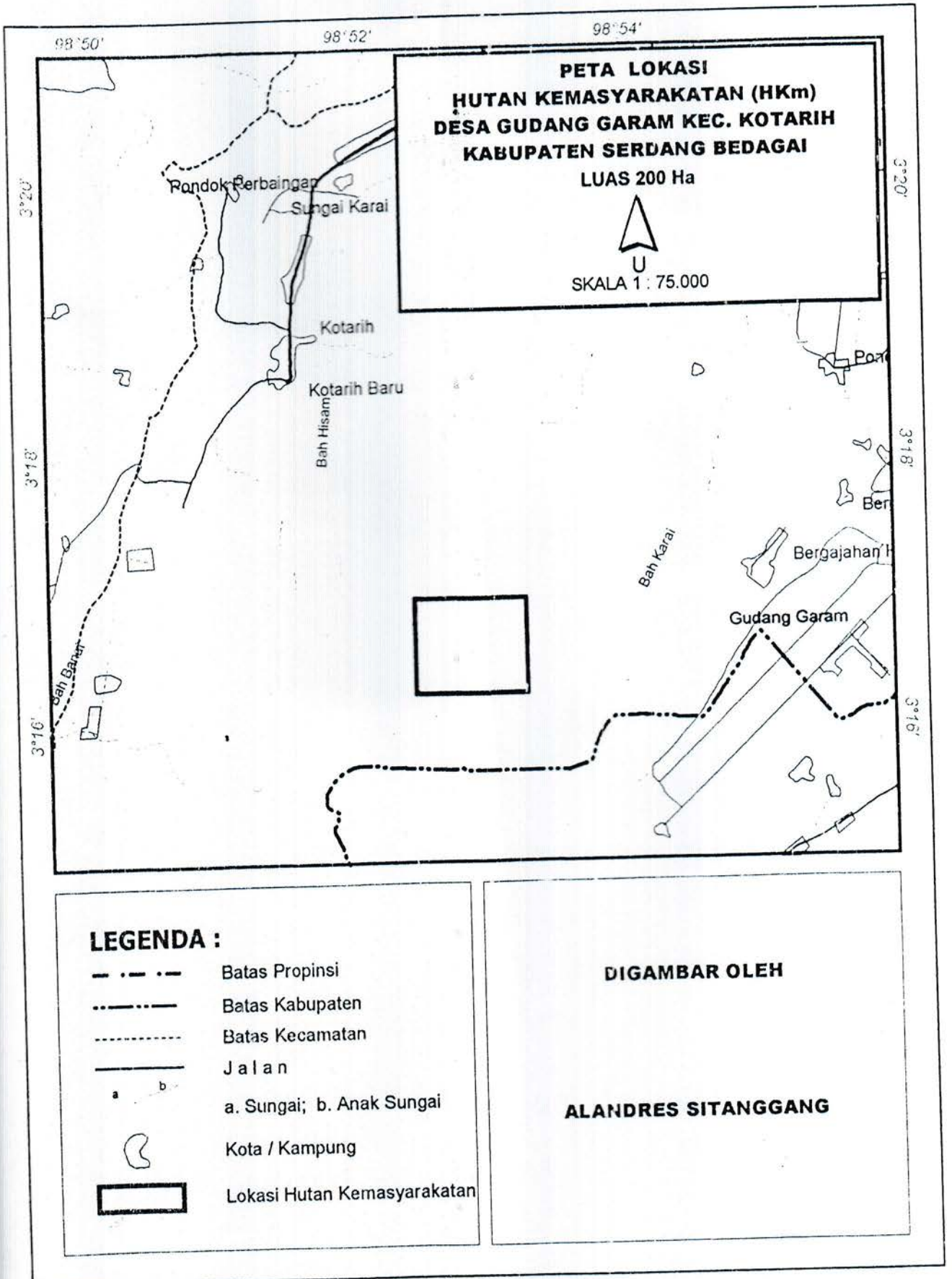

UNIVERSITAS MEDAN AREA